

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNICEF DALAM MENINGKATKAN
PENDIDIKAN ANAK DI INDIA DI MASA COVID 2020-2022**

SKRIPSI



Oleh:

NURUL FAHMI

17323109

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNICEF DALAM MENINGKATKAN
PENDIDIKAN ANAK DI INDIA DI MASA COVID 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NURUL FAHMI

17323109

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Implementasi Kebijakan UNICEF Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak di India Di masa Covid 2020-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

3 Januari 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Ketua Program Studi

Karina

Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.
- 2 Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 3 Januari 2023



Nurul Fahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Cakupan penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka.....	6
1.6 Kerangka Pemikiran	8
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 Jenis Penelitian	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	16
1.8.4 Proses Penelitian	16
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB 2 KONDISI PENDIDIKAN ANAK DI INDIA DAN SEJARAH MASUKNYA UNICEF DI INDIA	18
2.1 Kondisi Pendidikan Anak dan Upaya Pemerintah India Untuk Pendidikan Anak Sebelum Covid.....	18
2.1.1 Undang-Undang/Kebijakan/Program Pemerintah India Untuk Pendidikan Anak Sebelum Covid.....	22
2.1.2 Program Pemerintah India Untuk Pendidikan Anak di India Sebelum Covid	24
2.2 Kondisi Umum India dan Kondisi Pendidikan Anak di India Di masa Covid.....	28
2.2.1 Upaya Pemerintah India Untuk Pendidikan Anak Di masa Awal Covid	32
2.3 Profil UNICEF dan Sejarah Masuknya UNICEF Di India	35

BAB 3 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNICEF DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDIA DI MASA COVID 2020-2022.....	39
3.1 Pendekatan Manajerial (<i>Management Approach</i>)	40
3.1.1 Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah India Kepada UNICEF India.....	40
3.1.2 Kerja sama UNICEF dengan IGO	41
3.1.3 Kerja sama UNICEF dengan NGO	42
3.1.4 Kerja sama UNICEF dengan Pemerintah India	43
3.2 Peningkatan Kapasitas dan <i>Problem Solving</i> UNICEF Untuk Pendidikan Anak di India	45
3.2.1 Interpretasi aturan UNICEF Melalui Pembuatan UNICEF <i>Strategic Plan 2018-2021</i>	46
3.2.2 Interpretasi Aturan UNICEF dengan memberikan Materi <i>“Psychosocial Support for Children during Covid-19”</i>	47
3.2.3 Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan	48
3.2.4 Bantuan Teknis UNICEF Kepada Negara Bagian	50
3.2.5 Bantuan Keuangan UNICEF	51
BAB 4 PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Jumlah anak putus sekolah usia sekolah dasar Asia Selatan 1999-2012 (UNICEF, 2015).....	19
Gambar 2. 2 Jumlah anak putus sekolah sekolah dasar dan sekolah menengah populasi India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan (UNESCO, 2014).....	20
Gambar 2. 3 Total Durasi Penutupan Sekolah Di India 2020-2021 (UNESCO, 2021).	31
Gambar 2. 4 Total durasi penutupan sekolah di India 2020-2021 (UNESCO, 2021).	31



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah dan persentase anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama putus sekolah Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka (UNESCO, 2014)......20

Tabel 3. 1 Anggaran Program UNICEF untuk Anak di India Tahun 2022 (UNICEF, 2022)......54



DAFTAR SINGKATAN

APD: Alat Pelindung Diri

COVID-19: *Corona Virus Disease 2019*

DIKHSIA: *Digital Infrastructure for Knowledge Sharing*

FCC South Asia: *The Foreign Correspondents Club of South Asia*

ICDS: *Integrated Child Development Services*

IGO: *Intergovernmental Organization*

NCERT: *National Council for Education Research and Training*

NEP: *National Education Policy*

NGO: *Non-Governmental Organization*

NROER: *National Repository of Open Educational Resources*

OHCHR: *Office of the United Nations High Commissioner for Human Right*

PAUD: Program Pendidikan Anak Usia Dini

PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa

RTE: *Right to Education Act*

RUU: Rancangan Undang-Undang

UN-CRC: *United Nations Convention on the Rights of the Child*

UNESCO: *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*

UNFPA: *United Nations Population Fund*

UNICEF: *United Nations Children's Fund*

WFP: *World Food Programme*

WHO: *World Health Organization*

ABSTRAK

Rendahnya kesempatan anak-anak di India untuk mengakses pendidikan yang layak disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, wilayah, gender, kasta dan pendapatan orang tua. Pemerintah India membuat Undang-Undang, kebijakan dan program sebagai solusi untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak di India. Namun, hal tersebut semakin diperparah dengan adanya Pandemi Covid telah menyebar ke hampir seluruh negara, salah satunya India. India merupakan negara dengan kasus terkonfirmasi Covid tertinggi kedua di dunia pada tahun 2021. Hal tersebut menyebabkan penutupan sekolah yang menyebabkan pendidikan terhambat terutama bagi anak-anak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pendekatan UNICEF sebagai organisasi internasional yang khusus mengurus hak-hak anak dalam implementasi norma pendidikan anak di India di masa Covid.

Kata Kunci: Anak-anak, Covid, India, Pendidikan

ABSTRACT

The low opportunity for children in India to access proper education is caused by socio-economic factors, region, gender, caste and parents' income. The Government of India makes laws, policies and programs as a solution to help improve the quality of children's education in India. However, this has been exacerbated by the Covid Pandemic which has spread to almost all countries, one of which is India. India is the country with the second highest confirmed cases of Covid in the world in 2021. This has caused school closures which has hampered education, especially for children. This research was conducted to analyze UNICEF's approach as an international organization that specifically deals with children's rights in implementing child education norms in India during the Covid period.

Keywords: Children, Covid, Education, India

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia dengan jumlah total penduduknya mencapai 1,412 miliar (pwn, 2022). India merupakan negara berkembang dan ekonomi India masuk kedalam peringkat kelima terbesar di dunia (UNICEF, 2020). Namun, dengan perkembangan ekonomi yang terbilang cukup pesat tersebut berbanding terbalik dengan kondisi anak-anak di sana yang masih cukup memprihatinkan. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut belum dapat sepenuhnya memperbaiki kondisi anak-anak. Ada berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di India, seperti permasalahan kesehatan, angka kematian anak yang tinggi, rendahnya kualitas Pendidikan anak, eksploitasi anak, pelecehan terhadap anak, pernikahan anak dini (SAMARPAN, 2022). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya Pendidikan anak di India, yaitu faktor wilayah, gender, kasta dan pendapatan orang tua.

Ada sekitar 55% anak di Kawasan Asia Selatan yang telah terdaftar di pendidikan pra-sekolah yang mana mengalami kenaikan sekitar 22% dari tahun 1992. Pembelajaran dini menunjukkan bahwa faktor tersebut cukup penting dalam membantu menyiapkan anak untuk mengikuti sekolah formal. Tingkat pendaftaran dipendidikan dasar telah mencapai 90% tahun 2011, naik dari angka 75% ditahun 2000. Angka putus sekolah pada anak-anak di Asia Selatan mengalami penurunan secara global yaitu sekitar 9,8 juta pada tahun 2012 dari 36,7 juta ditahun 1999

(UNICEF, 2015). Akan tetapi, kenyataan tersebut tidak cukup menguntungkan bagi anak di India maupun dinegara Asia Selatan lainnya. Asia Selatan memiliki jumlah anak putus sekolah yang cukup tinggi. Ada beberapa faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi pendidikan anak di India seperti faktor wilayah, gender, kasta maupun pendapatan orang tua. Menurut survei rumah tangga menunjukkan bahwa ada sekitar 27 juta anak berusia 5-13 tahun tidak memiliki kesempatan bersekolah di India, Bangladesh, Pakistan dan Sri Lanka yang terdiri dari 17 juta anak usia sekolah dasar dan 9,9 juta usia sekolah menengah pertama. Ada sekitar 26,6 juta anak yang tidak bersekolah di empat negara tersebut, dan India merupakan negara dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi dengan jumlah 17,8 juta diikuti oleh Pakistan dengan 6,5 juta (UNESCO, 2014). Untuk mengatasi atau meminimalisir hal tersebut, Pemerintah India telah mengeluarkan Undang-Undang, kebijakan maupun program. Akan tetapi, dengan adanya upaya tersebut, angka anak putus sekolah atau tidak memiliki kesempatan belajar di India belum mengalami perubahan yang signifikan terkait pendidikan anak di India tersebut.

Hal itu kemudian semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid. Covid atau *Corona virus disease* merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-Cov-2 diperkirakan pertama kali muncul di Wuhan, China pada Bulan Desember tahun 2019. Pada akhir Maret 2020, telah tercatat sebanyak 205 negara telah melaporkan kasus Covid (UNICEF, 2020). Wabah Covid seketika menjadi perhatian masyarakat internasional dikarenakan virus yang menular cukup cepat melalui kontak langsung melalui saluran pernapasan yang dihasilkan melalui batuk serta bersin. Pada tanggal 11 Maret 2020, organisasi internasional WHO telah menetapkan Covid sebagai pandemi global. Penyebaran Virus Covid yang cepat

membuat negara diseluruh dunia gencar melakukan berbagai upaya dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid seperti diterapkannya *lockdown*, masyarakat dihimbau untuk tidak bepergian atau melakukan perjalanan untuk sementara waktu baik secara nasional maupun internasional. Kemudian, penerapan *social distancing* yaitu menjaga jarak dengan orang lain, dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara massal seperti PCR/Antigen, hingga melakukan vaksinasi secara bertahap (Martha, 2020).

Virus Covid-19 semakin lama semakin menyebar kehampir seluruh negara di penjuru dunia, salah satunya India. India merupakan negara yang menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat (*BBC News*, 2022). Kasus pertama Covid di India terjadi pada seorang mahasiswi yang berasal dari Distrik Thrissur yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Wuhan, China (Perappadan, 2020). Pemerintah India melakukan langkah pertama untuk menekan penyebaran Covid dengan menerapkan *lockdown*, membatasi kunjungan warga asing melalui transportasi darat, laut maupun udara, dan upaya-upaya lainnya seperti membuat vaksin dan memberikan fasilitas karantina yang memadai, tempat isolasi, pelatihan pekerjaan kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), dan obat-obatan disemua negara bagian di India dalam rangka menangani dan menekan peningkatan kasus Covid di India. (Sharma, 2022). Kasus Covid di India sempat stabil pada pertengahan mendekati akhir tahun 2020. Tahun 2020, tercatat 10.323.965 kasus Covid dan 149.435 kasus kematian akibat covid-19 di India (WHO, 2022). Akan tetapi, Kasus Covid kembali mengalami kenaikan drastis pada awal tahun 2021 dengan 34.889.132 kasus Covid-19 di India dan 481.770 kasus kematian akibat Covid. Pada tanggal 1 Mei 2021, India menjadi negara pertama di dunia yang mencatat

lebih dari 400.000 kasus infeksi Covid dalam satu hari. Hal itu tersebut yang membawa India menempati peringkat kedua kasus Covid tertinggi di dunia dengan 25 persen kematian global akibat Covid (WHO, 2022). Dan pada tahun 2022, Kasus Covid di India tercatat sebanyak 44.510.057 kasus dan 528.745 kasus kematian akibat Covid (WHO, 2022). Pemerintah India mengalami kesulitan dalam menyiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kasus terinfeksi Covid tersebut.

Dengan adanya pandemi Covid tersebut menyebabkan darurat kesehatan masyarakat pada umumnya dan menyebabkan krisis hak anak khususnya, salah satunya dengan adanya penutupan sekolah yang mengakibatkan sekitar 286 juta anak-anak tidak dapat bersekolah dan mengikuti pembelajaran seperti hari biasanya. Pembelajaran jarak jauh menjadi satu-satunya solusi agar anak-anak tetap dapat belajar meskipun hanya dari rumah. Akan tetapi, sejumlah besar anak-anak yang berasal dari daerah terpencil dan miskin tidak dapat menggunakan teknologi digital dan tidak dapat mengakses pendidikan jarak jauh. Hanya 5 hingga 10 persen saja dari anak-anak yang mengikuti pembelajaran jarak jauh (*online*) (UNICEF, 2020). Menurut data UNICEF, ditahun 2020, krisis sosial-ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi Covid ini dapat mendorong lebih dari 142 juta anak-anak ke dalam keluarga miskin di negara-negara berkembang tidak mendapatkan kesempatan belajar yang baik. Hampir dua pertiga dari anak-anak tersebut tinggal di Kawasan Asia Selatan (UNICEF, 2022). Maka dari itu, penulis ingin membahas pendekatan UNICEF sebagai organisasi internasional sekaligus mitra yang bekerja sama dengan India dalam implementasi kebijakan UNICEF dalam meningkatkan pendidikan anak di India Di masa Covid (2020-2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi kebijakan UNICEF dalam meningkatkan pendidikan anak di India Di masa Covid 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi pendidikan anak di India di masa Covid.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan UNICEF untuk menangani masalah pendidikan anak di masa Covid.
3. Untuk mengetahui pendekatan yang diambil oleh UNICEF dalam implementasi norma pendidikan anak di India di masa Covid 2020-2022.

1.4 Cakupan penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan UNICEF dalam implementasi norma pendidikan di India di masa Covid 2020-2022. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada bagaimana awal mula masuknya Covid beserta penyebaran virusnya yang berdampak pada pendidikan anak-anak di India. Selain itu, penulis juga membatasi pembahasan dalam penelitian ini di rentang waktu 2020-2022 karena pada awal-pertengahan 2021 kasus Covid di India mengalami kenaikan yang cukup drastis.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jurnal maupun penelitian sebagai perbandingan. “*a Study of The Relationship Between Indian Parent’s Education Level and Their Involvement in Thei Children’s Education*” merupakan jurnal penelitian yang disusun oleh Suresh Kumar N Vellymalay yang menjelaskan mengenai pendidikan orang tua yang merupakan faktor penting dalam mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Semakin tinggi standar pendidikan orang tua, semakin tinggi pula kepercayaan diri terhadap keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka (Kumar N Vellymalay, 2011).

“Pandemi dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Kasus Peran UNICEF di Yaman Pada Masa Covid-19” merupakan jurnal yang disusun oleh Erzalina Widya Kusuma, Djatmiko, dan Resa Rasyidah menjelaskan mengenai peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang bertugas menangani permasalahan anak diseluruh dunia, khususnya di Yaman. Yaman diidentifikasi oleh PBB sebagai salah satu negara yang paling terdampak dan memiliki jumlah kematian jumlah kasus kematian tertinggi akibat Covid-19. Anak-anak disana sangat rentan terkena penyakit ditambah dengan trauma mereka cukup mendalam akibat terjadinya perang sebelumnya (Kusuma, Djatmiko, and Rasyidah, 2021).

“Peran *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di India Periode Tahun 2010-2012” merupakan penelitian yang disusun oleh Nurhayati Inayatul Maula menjelaskan mengenai bagaimana peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus pernikahan anak di India. India memang merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di dunia. Hal itu terjadi karna beberapa faktor seperti masih

lekatnya budaya patriarki di India, faktor ekonomi, pendidikan yang masih minim untuk perempuan khususnya hingga terjadinya pernikahan anak (Nurhayati Inayatul, 2014).

“Peranan UNICEF Dalam Menangani *Child Trafficking* Di Indonesia” merupakan jurnal yang disusun oleh Nori Oktadewi dan Khairiyah menjelaskan mengenai maraknya isu perdagangan anak khususnya di Indonesia. Perdagangan anak atau *child trafficking* terjadi di Indonesia dikarenakan beberapa alasan seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan yang bagus sehingga masyarakat di Indonesia kurang bisa menerima informasi dengan baik serta penegakkan hukum yang masih lemah sehingga praktik perdagangan anak cukup leluasa dilakukan (Oktadewi and Khairiyah, 2018).

“Peran *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) Dalam Mengatasi Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan di India Pada Tahun 2014-2018” merupakan penelitian yang disusun oleh Tiara Marthadyta menjelaskan bahwa masih maraknya diskriminasi terhadap perempuan di India. Oleh karena itu, UNICEF sebagai organisasi internasional yang mengurus atau bekerja untuk menegakkan hak-hak perempuan dan khususnya anak diseluruh dunia ikut serta dalam menangani permasalahan tersebut. UNICEF melakukan pengawasan serta memberikan bantuan secara teknis maupun keuangan untuk mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap perempuan di India tersebut (Marthadyta, 2022).

Dari jurnal dan penelitian skripsi yang tercantum Di atas, adapun perbedaan penelitian ini dengan jurnal maupun penelitian di atas adalah penelitian ini membahas mengenai pendekatan UNICEF dalam implementasi norma pendidikan

anak di India. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini mengambil tahun penelitian terbaru yaitu tahun 2020-2022 di masa Covid.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis pendekatan UNICEF dalam implementasi norma pendidikan anak di India di masa Covid 2020-2022, penulis menggunakan teori “*International Organizations and Implementation*” yang ditulis Oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi dan Bertjan Verbeek.

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
Resources	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports • <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoring</i> on the basic of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports • <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Authority and legitimacy</i>

Gambar 1. 1 Tiga pendekatan implementasi kebijakan organisasi internasional (Joachim, Reinaldi, and Verbeel, 2008).

Ada tiga pendekatan dalam pengimplementasian organisasi internasional, yaitu:

1. *Enforcement approach*, pendekatan penegakan ini bersifat memaksa. Dalam pendekatan ini menunjukkan kepatuhan terhadap suatu perjanjian internasional dengan cara yang memaksa. Pendekatan ini menggunakan hukuman sebagai sanksi jika negara yang terikat tidak patuh dan tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati dengan baik. Dalam pendekatan ini, negara adalah aktor rasional yang telah mempertimbangkan semuanya mulai dari biaya hingga manfaat dari suatu perjanjian (Joachim, Reinaldi, and Verbeel, 2008).

Pendekatan penegakan memiliki dua alat, yaitu pemantauan dan sanksi. Pemantauan berguna untuk memberikan transparansi dari organisasi internasional dan negara yang memiliki kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian sehingga nantinya jika ada pelanggaran yang dilakukan akan lebih cepat diketahui. Pemantauan dapat berupa laporan (tidak langsung) dan pemantauan secara langsung dengan turun ke lapangan melalui perwakilan dari organisasi internasional. Kedua, sanksi berupa *naming* dan *shaming* akan diterima akan diterima oleh negara apabila negara tidak mentaati perjanjian yang telah dibuat dengan organisasi internasional. Negara yang tidak mentaati peraturan akan dipermalukan dihadapan publik (Joachim, Reinaldi, and Verbeel, 2008).

2. *Management approach*, pendekatan manajerial ini berbeda dengan pendekatan penegakkan. Pendekatan ini lebih terbuka dan tidak memaksa. Pemecahan terhadap masalah, interpretasi aturan, pengembangan kapasitas serta transparansi merupakan ciri dari pendekatan manajemen. Organisasi

internasional maupun lembaga yang ada didalamnya dapat berperan penting dalam pengimplementasiannya karena hal itu dapat berguna untuk membantu mengembangkan kapasitas pengambilan keputusan bagi negara (Joachim, Reinaldi, and Verbeel, 2008).

Pendekatan manajerial memiliki beberapa cara yaitu organisasi internasional dapat melakukan pengawasan terhadap negara yang bersangkutan melalui laporan pemerintah negara, Kerja sama dengan NGOs, maupun komite khusus yang dibentuk. Kedua, *capacity building* yang mana organisasi internasional dapat melakukan peningkatan kapasitas pada keamanan, hukum, serta penjagaan pada perbatasan kepada negara yang bersangkutan. Sebelum itu, organisasi internasional akan melihat keadaan yang terjadi terlebih dahulu kemudian organisasi internasional akan mengadakan diskusi dengan para ahli dan memberikan saran terbaik kepada negara yang bersangkutan. Ketiga, *problem solving* dengan memberikan bantuan teknis maupun keuangan kepada negara yang bersangkutan (Joachim, Reinaldi, and Verbeel, 2008).

3. *Normative approach*. Selain Pendekatan penegakan dan Pendekatan manajerial, ada juga pendekatan lain, yaitu Pendekatan normatif, yang mana pendekatan ini menekankan kekuatan normatif organisasi internasional dalam memengaruhi negara untuk mematuhi perjanjian internasional melalui otoritas dan legitimasi yang dimiliki organisasi internasional (Joachim, Reinaldi, and Verbeel, 2008). Terdapat dua sumber otoritas organisasi internasional. Pertama, kontrol terhadap informasi dan keahlian. Pengetahuan teknis khusus, pelatihan dan pengalaman dapat

memungkinkan organisasi, birokrasi atau badan-badannya untuk melaksanakan arahan maupun kesepakatan secara lebih efisien dan juga memberikan kekuatan atas aktor-aktor lain yang kurang berpengalaman (Joachim, Reinaldi, and Verbeel, 2008). Kedua, organisasi internasional dianggap rasional dan tidak memihak. Hal ini dapat dikaitkan dengan aturan dan prosedur yang menjadi dasar keberadaannya. Menurut pendekatan normatif, daripada memaksa negara atau mengelola implementasi, organisasi internasional menggunakan argumen yang masuk akal untuk meyakinkan negara bahwa memenuhi komitmen internasional mereka merupakan hal yang benar untuk dilakukan (Joachim, Reinaldi, and Verbeel, 2008).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan manajerial (*Management approach*) untuk mengimplementasikan norma pendidikan anak di India. UNICEF berupaya untuk membantu mengatasi permasalahan pendidikan anak di India dengan melakukan *monitoring* melalui kerja sama dengan IGO, NGO dan Pemerintah India. Kemudian, UNICEF juga melakukan peningkatan kapasitas dan *problem solving* melalui interpretasi aturan, bantuan teknis dan bantuan keuangan.

Penulis tidak menggunakan Pendekatan normatif (*Normative approach*) dikarenakan tidak mempersuasi India untuk mengubah kebijakan terkait pendidikan anak di India di masa Covid. Penulis juga tidak menggunakan Pendekatan penegakan (*Enforcement approach*) dalam menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini dikarenakan India sebagai anggota sekaligus mitra kerja sama dari organisasi internasional dalam hal ini UNICEF tidak melalaikan ataupun

melanggar perjanjian internasional melainkan India bekerja sama dengan UNICEF dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak (UN-CRC) untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di India. India juga telah menyetujui secara sukarela terkait program-program yang dijalankan oleh UNICEF di India.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dipaparkan di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh UNICEF dalam mengimplementasikan norma pendidikan anak di India, yaitu dengan:

1. Pendekatan manajerial (*Management approach*), yaitu:

a. *Monitoring*:

- NITI Aayog (Pemerintah India) membuat laporan pertanggung jawaban kepada UNICEF mengenai anak di India.
- UNICEF memfasilitasi dan memantau Kementerian Pendidikan, Lingkungan dan Kesehatan untuk mendiskusikan pembukaan kembali sekolah melalui pertemuan *Regional South East Asia Consultation* yang diselenggarakan bersama dengan UNESCO, WHO, UNFPA dan WFP.
- UNICEF melakukan kerja sama dengan NGO yaitu FCC *South Asia* untuk melakukan panel diskusi *online* untuk mendiskusikan mengenai pembukaan kembali sekolah-sekolah di India dan UNICEF bertugas untuk memantau

adanya dampak sosial-ekonomi dari pandemi Covid ini terhadap anak-anak di India. Para perwakilan dari NGO yang bekerja di India melaporkan dengan adanya Covid ini anak-anak kesulitan untuk mengakses pembelajaran jarak jauh selama penutupan sekolah, terutama bagi anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan dan terpinggirkan kesulitan untuk mendapatkan akses internet dan tidak memiliki akses ke *gadget* atau *smartphone*, dan

- UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah India untuk mengadakan Kampanye ‘Chakmak’ di Chhattisgarh. UNICEF juga mendukung Kemendikbud untuk membagikan *platform e-learning* digital gratis dari Pemerintah India seperti DIKHSAs, *e-Pathshala*, *National Repository of Open Educational Resources* (NROER), dan EdTech yang berguna bagi pendidikan anak di masa Covid-19.

b. Peningkatan kapasitas dan Problem Solving:

- UNICEF menginterpretasikan aturan dengan membuat UNICEF *Strategic Plan* 2018-2021 dan memberikan informasi kepada orang tua dan pengasuh untuk membantu memperbaiki kondisi psiko-sosial anak di masa Covid dengan adanya penutupan sekolah yang dapat diakses melalui *website* resmi UNICEF.

- UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah India untuk memberikan pelatihan kepada guru agar dapat memberikan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik kepada siswa selama penutupan sekolah di masa Covid serta memberikan fasilitas *hotspot* kepada guru-guru yang berada di wilayah yang mempunyai konektivitas jaringan yang kurang stabil. Selain itu, UNICEF juga memberikan pelatihan kepada kepala lembaga dan kepala sekolah untuk memberikan bantuan dukungan psiko-sosial bagi kesehatan mental dan kesejahteraan bagi siswa, guru dan orang tua selama Covid.
- UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah negara bagian, LSM, India Childline, Institut Nasional Kesehatan Mental dan Ilmu Neuro (*the National Institute of Mental Health and Neuro Science*), Otoritas Manajemen Bencana Nasional (*the National Disaster Management Authority*) dan Otoritas Perlindungan Anak untuk mengembangkan manual pelatihan untuk perawatan psiskososial untuk anak selama penutupan sekolah berlangsung dan memberikan pelatihan kepada para relawan dan pengasuh untuk anak-anak selama penutupan sekolah di masa Covid.

- UNICEF memberikan bantuan teknis kepada negara-negara bagian untuk meningkatkan pendidikan anak di India di masa Covid.
- UNICEF memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara bagian untuk meningkatkan pendidikan anak di India di masa Covid.

Penulis tidak menggunakan Pendekatan normatif (*Normative approach*) dikarenakan tidak mempersuasi India untuk mengubah kebijakan India untuk meningkatkan pendidikan anak di India di masa Covid. Penulis juga tidak menggunakan Pendekatan penegakan (*Enforcement approach*) dalam menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini dikarenakan India sebagai anggota sekaligus mitra kerja sama dari organisasi internasional dalam hal ini UNICEF tidak melalaikan ataupun melanggar perjanjian internasional melainkan India bekerja sama dengan UNICEF dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak (UN-CRC) untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di India. India juga telah menyetujui secara sukarela terkait program-program yang dijalankan UNICEF di India.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis memerlukan data-data pendukung yang valid untuk dapat memudahkan penulis dalam menganalisa pendekatan UNICEF dalam mengimplementasikan norma pendidikan anak di India

di masa Covid. Maka dari itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka atau sumber data maupun sekunder. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jurnal, buku, *website*, maupun berita yang sudah terbukti keasliannya yang dikaji agar mampu menjawab dan memahami masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek dan objek penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada pendekatan UNICEF dalam mengimplementasikan norma pendidikan anak di India di masa Covid.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi maupun data melalui jurnal, buku, penelitian-penelitian terdahulu, dan berita elektronik. Data yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik keasliannya.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan jurnal, buku, laporan tahunan dari *website* resmi organisasi internasional UNICEF maupun berita elektronik yang membahas mengenai pendekatan UNICEF dalam mengimplementasikan norma pendidikan anak di India di masa Covid.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis telah membagi pembahasan ke dalam 4 bab yang berbeda, yaitu:

Bab 1 berisi Pendahuluan. Penulis akan memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Cakupan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Argumen Sementara, dan Metode Penelitian.

Bab 2 menjelaskan mengenai profil UNICEF, kondisi anak-anak sebelum di bidang Pendidikan serta Undang-Undang, kebijakan maupun program-program yang dibuat oleh Pemerintah India dalam menangani permasalahan anak di India di bidang pendidikan sebelum Covid serta upaya yang dilakukan Pemerintah India selama Covid untuk pendidikan anak di India terkait penutupan sekolah.

Bab 3 menjelaskan mengenai pendekatan UNICEF dalam implementasi terhadap norma pendidikan anak di India di masa Covid dengan menggunakan Pendekatan manajerial (*Management approach*).

Bab 4 berisi Kesimpulan dan Rekomendasi dari penulis terhadap penelitian ini. Di Bab ini juga akan berisi Saran dan Rekomendasi mengenai hasil penelitian ini bagi penelitian-penelitian yang akan ada di masa mendatang yang berkaitan dengan tema atau topik ini.

BAB 2

KONDISI PENDIDIKAN ANAK DI INDIA DAN SEJARAH MASUKNYA

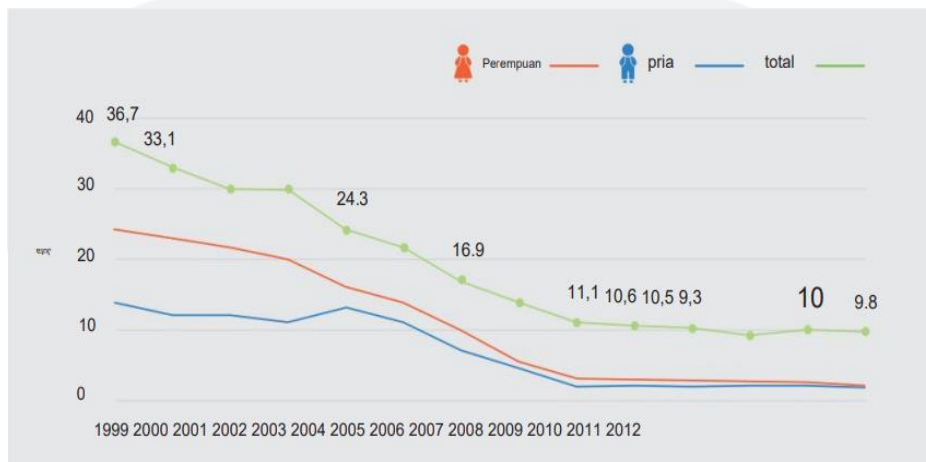
UNICEF DI INDIA

Dalam Bab 2 ini akan menjelaskan mengenai kondisi umum anak di India secara singkat sebelum pandemi serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesempatan anak-anak di India untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Selain itu, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Undang-Undang, kebijakan maupun program yang dibuat oleh Pemerintah India sebelum adanya Covid. Kemudian, akan dijelaskan juga mengenai kondisi awal penyebaran Covid beserta respon awal dari pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid. Dalam bab ini akan menjelaskan juga mengenai kondisi pendidikan anak setelah Pandemi Covid, dan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah India untuk mengatasi masalah pendidikan anak yang terhambat selama penutupan sekolah akibat adanya Covid. Selain itu, dalam Bab 2 ini akan menjelaskan mengenai profil singkat UNICEF, sejarah UNICEF masuk di India, empat prinsip kemanusiaan UNICEF, dan norma yang ada dalam UN-CRC yang digunakan oleh UNICEF sebagai acuan dalam membantu menangani pendidikan anak di India.

2.1 Kondisi Pendidikan Anak dan Upaya Pemerintah India Untuk Pendidikan Anak Sebelum Covid

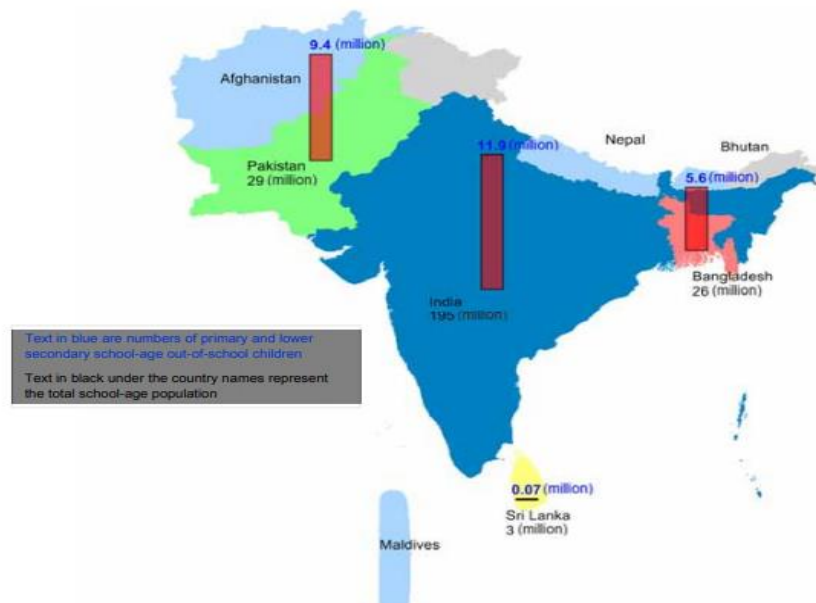
Jauh sebelum Pandemi Covid menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, India sudah memiliki permasalahan anak yang masih menjadi perhatian, berbagai permasalahan anak terjadi di India, salah satunya adalah permasalahan masih rendahnya kesempatan untuk pendidikan anak yang layak. Sekitar 55 persen anak

di Asia Selatan sudah terdaftar di pendidikan pra-sekolah pada tahun 2012 yang mana telah mengalami peningkatan dari tahun 1992, dan Asia Selatan mengalami penurunan terbesar dalam jumlah anak putus sekolah di usia sekolah dasar secara global. Tingkat pendaftaran sekolah dasar mencapai sekitar 9,8 juta pada tahun 2012 dari 36,7 juta pada tahun 1999 (UNICEF, 2015).



Gambar 2. 1 Jumlah anak putus sekolah usia sekolah dasar Asia Selatan 1999-2012 (UNICEF, 2015).

Akan tetapi, jumlah anak putus sekolah di India kembali meningkat meskipun ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pendidikan. India adalah negara dengan jumlah anak putus sekolah tertinggi diantara negara-negara di Asia Selatan lainnya yaitu sekitar 17,8 juta anak yang diikuti oleh Pakistan dengan 6,5 juta anak (UNESCO, 2014).



Gambar 2. 2 Jumlah anak putus sekolah sekolah dasar dan sekolah menengah populasi India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan (UNESCO, 2014).

Tabel 2. 1 Jumlah dan persentase anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama putus sekolah Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka (UNESCO, 2014).

Negara	Dimensi 2: Anak Usia sekolah dasar		Dimensi 3: Anak usia sekolah menengah pertama	
	Anak usia sekolah dasar putus sekolah sebagai persentase dari total populasi usia SD (%)	Jumlah anak putus sekolah usia SD (Juta)	Anak usia sekolah menengah pertama putus sekolah sebagai persentase dari total populasi usia SMP (%)	Jumlah anak putus sekolah usia SMP (Juta)
Bangladesh	16,2%	2,6	30,7%	3.0
India*	6,4%	7,8	5,7%	4,0
Pakistan	34,4%	6,6	30,1%	2,8
Sri Lanka	1,9%	0,03	3,2%	0,04

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan anak di India, antara lain :

1. Wilayah

Perbedaan status pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan menjadi salah satu faktor terjadi rendahnya pendidikan di India. Hampir semua proyek pembangunan terjadi di daerah perkotaan. Infrastruktur lembaga pendidikan di daerah perkotaan meliputi ruang kelas yang lebih baik. Sementara di daerah pedesaan masih kekurangan banyak fasilitas termasuk fasilitas kebersihan dan sanitasi. Banyaknya sekolah-sekolah di India yang tidak memiliki ruang kelas yang layak dan kurangnya air bersih menghambat siswa untuk memiliki kesempatan pendidikan yang lebih baik.

2. Gender

Budaya patriarki masih kental di India, perempuan dianggap bekerja untuk laki-laki dan berada dibawah pengawasan laki-laki. Perempuan tidak cukup didorong untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti laki-laki. Hal tersebut disebabkan oleh pemikiran orang tua yang menganggap bahwa pendidikan untuk anak laki-laki lebih penting dibandingkan dengan anak perempuan. Anak perempuan diharapkan untuk segera menikah dan mengikuti suaminya supaya tidak menjadi beban orang tua lagi. Dalam beberapa kelompok sosial, anak perempuan yang menempuh pendidikan lebih dari kelas 5 Sekolah Dasar, mereka sudah dianggap lebih berpendidikan dan tidak memenuhi syarat untuk menikah lagi. Sedangkan, anak laki-laki lebih dimotivasi oleh keluarga maupun masyarakat untuk

belajar lebih giat dan menempuh pendidikan setinggi mungkin supaya lebih terhormat di mata masyarakat.

3. Kasta

Sistem kasta di India merupakan salah satu masalah utama bagi banyak masalah dalam proses pembangunan. Masyarakat India terbagi kedalam beberapa kelompok sosial mulai dari tingkat teratas sampai tingkat terendah yang mana masing kelompok memiliki nilai dan keyakinan mereka sendiri. Perilaku kelompok sosial tersebut adalah salah satu faktor yang menimbulkan permasalahan dalam bidang pendidikan di India. Maka dari itu, anak-anak yang berasal dari kelompok sosial rendah seringkali mendapatkan pendidikan yang kurang merata dan bahkan diperlakukan secara tidak adil.

4. Pendapatan Orang tua

Di negara berkembang seperti India yang mayoritas pendapatan masyarakatnya menengah kebawah, pendapatan Orang tua dapat berkaitan langsung dengan kondisi pendidikan anak-anak mereka. Tidak setiap keluarga memiliki penghasilan tetap dan tercukupi. Maka dari itu, biaya pendidikan untuk anak mereka menjadi permasalahan yang menyebabkan rendahnya pendidikan di sana.

2.1.1 Undang-Undang/Kebijakan/Program Pemerintah India Untuk Pendidikan Anak Sebelum Covid

Pemerintah India mengeluarkan RUU Konstitusi (Amandemen ke-83), 1997, dengan tujuan untuk menjadikan pendidikan gratis dan wajib sebagai hak

dasar diperkenalkan di Parlemen dan menyisipkan pasal baru yaitu Pasal 21-A, kemudian RUU Konstitusi (Amandemen ke-93), 2001 (Legislative Department of India, 2018). Kemudian, Pemerintah India mengeluarkan UU Amandemen Konstitusi (Amandemen ke-86) 2002 menambahkan Pasal 21-A dalam Konstitusi India untuk menyediakan pendidikan gratis dan wajib bagi semua anak dalam kelompok usia 6-14 tahun. Pemerintah India juga mengeluarkan UU Hak Anak untuk Pendidikan Gratis dan Wajib (RTE), 2009, yang mewakili UU Konsekuensial yang dipertimbangkan dalam Pasal 21-A, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar penuh dan berkualitas serta merat di sekolah formal. Pasal 21-A dan UU RTE mulai diberlakukan pada 1 April 2010. UU RTE mengatur tentang anak dan guru (DSEL, 2021).

UU RTE yang mengatur tentang anak :

1. Hak anak atas pendidikan gratis dan wajib sampai tamat pendidikan dasar di sekolah lingkungan.
2. 'Wajib Belajar' diartikan bahwa kewajiban pemerintah yang sesuai untuk menyediakan pendidikan dasar gratis dan memastikan anak-anak wajib masuk, mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dasar untuk kelompok usia 6-14. 'Gratis' berarti tidak seorang anakpun akan bertanggung jawab untuk membayar biaya pengeluaran apapun yang dapat menghalangi anak-anak untuk mengejar dan menyelesaikan pendidikan dasar (Department of School Education & Literacy 2021).
3. Membuat ketentuan bagi anak yang tidak diterima untuk diterima di kelas yang sesuai dengan usia.

Selain Undang-Undang, Pemerintah India juga mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di India. Pemerintah India berkomitmen untuk mempromosikan perkembangan yang optimal serta kapasitas belajar aktif untuk semua anak yang berusia dibawah 6 tahun dengan mengeluarkan *National Early Childhood Care and Education Policy (ECCE)* (GoI, 2013). Kebijakan ECCE menegaskan kembali mengenai komitmen Pemerintah India untuk memastikan anak-anak memiliki dasar yang kuat untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan serta perkembangan mereka dengan berfokus pada pengasuhan dan pembelajaran yang lebih awal untuk anak-anak yang berusia 3-6 tahun (GoI, 2013).

2.1.2 Program Pemerintah India Untuk Pendidikan Anak di India Sebelum Covid

Ada beberapa program yang dibuat oleh Pemerintah India untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di India, antara lain:

1. Integrated Child Development Services (ICDS)

Ada sekitar 158 juta penduduk di India yang merupakan anak-anak dengan rentang usia 0-6 tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan berbagai upaya untuk membantu mensejahterakan perkembangan dan Perlindungan Anak, salah satunya dengan meluncurkan program ICDS yang merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah India dan merupakan program terbesar yang khusus bergerak dibidang pengasuhan dan perkembangan anak di India yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 1975 (GoI, 2009). Adanya program ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah India untuk ibu dan anak sebagai

bentuk tanggapan terhadap tantangan penyediaan pendidikan non-formal pra-sekolah. Terdapat enam layanan yang ditawarkan dalam program ini seperti nutrisi tambahan, imunisasi, pendidikan gizi dan kesehatan, pendidikan non-formal pra-sekolah, pemeriksaan kesehatan dan layanan rujukan (GoI, 2009). Layanan dalam program ICDS ini dioperasikan melalui jaringan 1,3 juta Anganwadi dan ada sekitar 104,5 juta orang yang terdiri dari ibu hamil dan anak-anak pada tahun 2014 (Eboo Alwani, 2019). Program ini juga oleh Program Pangan Dunia, UNICEF, World Bank, USAID, Uni Eropa, dan CARE. Tujuan dari adanya program ini, yaitu :

- a. Menurunkan angka kematian, sakit, gizi buruk, dan angka putus sekolah (GoI, 2009).
- b. Memperbaiki serta meningkatkan gizi dan kesehatan anak 0-6 tahun (GoI, 2009).
- c. Mempelajari perkembangan fisik, psikologis dan sosial anak yang tepat (GoI, 2009).
- d. Mencapai koordinasi kebijakan serta implementasi yang efektif untuk mempromosikan perkembangan anak (GoI, 2009).
- e. Meningkatkan kemampuan ibu untuk membantu menjaga kesehatan normal dan kebutuhan gizi anak melalui pendidikan kesehatan dan gizi yang tepat (GoI, 2009).

2. Balwadis

Program Balwadis telah diadakan sejak tahun 1970-1971. Pada tahun 2011, ada sekitar 5 641 Balwadi di seluruh negara India. Program Balwadis dipromosikan dengan bantuan dari empat organisasi sukarela ditingkat

nasional yaitu *the Council for Child Welfare* (Dewan India untuk Kesejahteraan Anak), *Central Social Welfare Board* (Dewan Kesejahteraan Sosial Pusat), *Harijan Sewak Sangh* and *Bharatiya Adanjati* (Verma, 1994). Selain itu, dan untuk pemberian makanan program gizi dan nutrisi Balwadis diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui organisasi sukarela. Program Balwadis tersebut diperuntukkan untuk anak-anak dengan rentang usia 3-6 tahun yang tinggal didaerah pedesaan yang menerima pendidikan pra-sekolah dasar. Tujuan dari diadakannya program tersebut adalah selain untuk memberikan pendidikan pra-sekolah juga untuk membantu memberikan dukungan gizi dan nutrisi bagi anak-anak. Mereka memberikan nutrisi tambahan sekitar 300 kalori dan 10 gram protein selama 270 hari pada anak-anak dengan rentang usia 3-6 tahun tersebut dalam setahun (Verma, 1994).

3. DIKSHA

Digital Infrastructure for Knowledge Sharing (DIKSHA) atau Infrastruktur Digital untuk Berbagi Pengetahuan merupakan sebuah platform nasional untuk pendidikan sekolah yang dibuat atas dasar inisiatif dari *National Council for Education Research and Training* (NCERT) atau Dewan Nasional untuk Penelitian dan Pelatihan Pendidikan, Pemerintah India yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh Wakil Presiden India. *Platform digital* DIKSHA tersebut telah diadopsi oleh hampir seluruh negara bagian, wilayah serikat, serta badan atau dewan otonom pusat. DIKSHA telah dikembangkan berdasarkan pada Makalah Strategi dan Pendekatan untuk *Platform Guru Nasional* yang dirilis pada Bulan September 2017 oleh

Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia. Platform DIKSHA mendukung 36 bahasa India dan dapat diakses oleh siswa maupun guru di seluruh negara bagian. Platform DIKSHA dapat dimanfaatkan oleh setiap negara bagian dengan cara mereka sendiri, karena mereka mempunyai kebebasan dan menentukan pilihan untuk menggunakan kemampuan dan solusi untuk merancang serta menjalankan program-program untuk guru, siswa dan administrator. Hal tersebut memungkinkan ekosistem pendidikan baik itu dari ahli pendidikan, pakar, organisasi, lembaga pemerintah, lembaga otonom, organisasi non-pemerintah dan swasta untuk ikut berpartisipasi, berkontribusi serta ikut memanfaatkan platform digital DIKSHA untuk bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran (GoI, 2017).

Dengan adanya Undang-Undang, kebijakan serta program-program yang telah dibuat oleh pemerintah India, tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di India masih tetap ada. Menurut data *Rapid Survey of Children* 2013-2014 MWCD, ada sekitar 50 persen anak dan remaja tidak dapat menyelesaikan pendidikan menengah mereka, serta ada sekitar 20 juta anak yang tidak bersekolah (UNICEF, 2020). Tahun 2014, lebih dari 70 persen anak-anak di India dalam kelompok usia 3-6 tahun mengikuti pendidikan pra sekolah dasar, akan tetapi kualitas pendidikan pra-sekolah masih menjadi perhatian. Meskipun tingkat partisipasinya tinggi, ada sekitar 20 juta anak yang masih belum mengikuti program pra-sekolah, dan dari jumlah tersebut, lebih dari sepertiga atau sekitar 35 persen anak-anak tersebut berasal dari keluarga miskin (UNICEF, 2019). Sedangkan, menurut data *National Achievement Survey*, NCERT 2017, ada sekitar 50 juta anak yang berada di tingkat sekolah dasar tidak dapat mencapai tingkat pembelajaran

yang sesuai kelasnya, serta anak-anak yang ada diusia 5 tahun tidak memiliki kesiapan untuk bersekolah sesuai dengan yang diharapkan (UNICEF, 2020). Kemudian, akses ke pendidikan menengah merupakan tantangan yang serius bagi populasi anak di India. Hal ini diperburuk oleh angka putus sekolah yang meskipun sudah mengalami penurunan, akan tetapi masih terbilang tinggi yaitu sekitar 36,3 persen ditingkat Sekolah Dasar (SD) dan 47,4 persen ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) (UNICEF, 2017). Menurut laporan tahun 2019, hanya sekitar 32 persen penduduk pedesaan berusia 12 tahun keatas dan sekitar 54 persen penduduk perkotaan memiliki akses internet, dan hanya 11 persen rumah tangga di India yang memiliki komputer seperti laptop dan tablet (tidak termasuk ponsel pintar) (UNICEF, 2021).

2.2 Kondisi Umum India dan Kondisi Pendidikan Anak di India Di masa Covid

India merupakan negara yang menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat (*BBC News*, 2022). Kasus pertama Covid di India terjadi pada seorang mahasiswi yang berasal dari Distrik Thrissur yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Wuhan, China (Perappadan, 2020). Pada tanggal 14 Maret 2020, Pemerintah India menyatakan Covid-19 sebagai “*Notified Disaster*” atau bencana yang diberitahukan. Pada tanggal 17 Maret 2020 Pemerintah India menyatakan telah tercatat kematian ketiga di India akibat Covid. India dengan cepat merespon dengan tujuan untuk menekan penyebaran virus Covid Di awal tahun 2020. Ada beberapa langkah pertama yang diambil oleh Pemerintah India dalam merespon penyebaran Covid tersebut, antara lain :

1. Pemerintah India membatasi kunjungan warga asing maupun warga India ke India melalui transportasi darat, laut, maupun udara. Pemerintah India juga sempat menangguhkan visa dengan tujuan membatasi penyebaran Covid di India.

2. *Lockdown*

Pada tanggal 24 Maret 2020, Pemerintah Modi secara tiba-tiba mengumumkan *lockdown* nasional selama 21 hari sebagai bentuk tindakan pencegahan penyebaran Covid. Pemerintah India mulai mengambil langkah dengan tujuan untuk menekan penyebaran Virus Covid dengan membatasi kedatangan warga asing ke India, menangguhkan visa, mewajibkan semua warga negara lain untuk menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dan wajib karantina untuk semua orang yang ingin masuk ke India, termasuk warga Negara India. Selain itu, Warga Negara India yang berada di luar India khususnya yang berada di negara-negara yang beresiko tinggi terhadap Covid untuk tetap tinggal dulu untuk sementara waktu. Perdana Menteri Modi melarang ekspor peralatan medis serta obat terlebih dahulu.

Kemudian, untuk menghentikan kemungkinan penularan Covid di masyarakat, pemerintah pusat India mengeluarkan perintah untuk tidak berkumpul secara *massal*, termasuk juga menutup sekolah, restoran, kuil, pusat kebugaran dan tempat umum lainnya. Pemerintah Modi kemudian memperpanjang *lockdown* secara bertahap. Fase 1, dilakukan pada tanggal 25 Maret-14 April/ 21 hari. Fase 2, dilakukan tanggal 15 April – 3 Mei/ 19 hari. Fase 3, dilakukan tanggal 4 Mei – 17 Mei/ 14

hari. Fase 4, dilakukan tanggal 18 Mei – 31 Mei, yang kemudian diperpanjang kembali sampai tanggal 31 Oktober 2020 (Sharma, 2022).

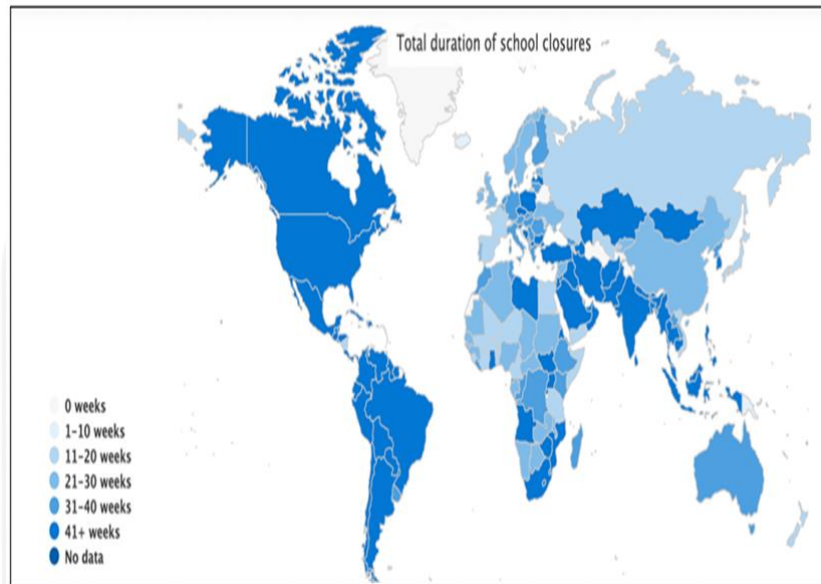
3. Persiapan Medis

Lockdown disertai dengan upaya nasional untuk meningkatkan kesiapan medis. Upaya kesiapsiagaan Rumah Sakit Nasional dilakukan untuk memastikan ketersediaan tempat tidur seperti tempat tidur isolasi, tempat tidur perawatan kritis, dan ventilator yang tersedia di Rumah Sakit khusus untuk Covid. Fasilitas kesehatan di Kementerian Pertahanan, Perburuhan, serta Lembaga Pemerintah Pusat dan negara bagian lainnya didaftarkan untuk menambah ketersediaan fasilitas. Kemudian, Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, obat-obatan dikumpulkan untuk menjaga ketersediaan stok selama Covid. Pembagian pedoman tata cara penanganan terhadap Covid, tenaga medis nasional menerima orientasi tentang pencegahan infeksi, manajemen klinis, protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mengadakan video konferensi yang bertujuan untuk memantau kondisi di tiap negara bagian untuk pencegah resiko penularan Covid.

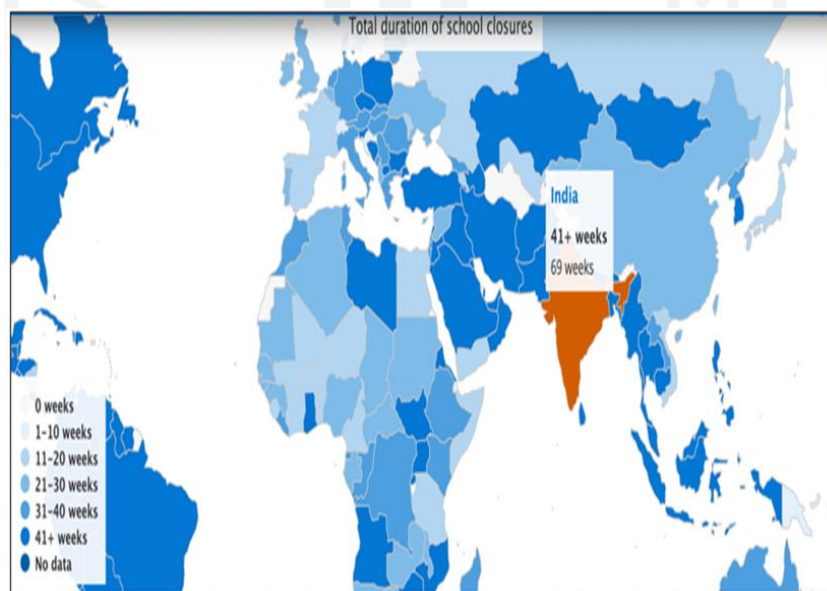
Covid berubah menjadi ancaman bagi masyarakat India terutama bagi anak-anak. Dengan tingginya kasus Covid dan diterapkannya *lockdown* menghambat anak-anak di India untuk mengakses pendidikan. Sekitar 286 juta anak-anak dan remaja yang terkena dampak penutupan sekolah akibat Covid-19.

Akibat adanya Pandemi Covid, sejarah pendidikan India yang sudah buruk semakin diperburuk lagi dengan ditutupnya sekolah pada Maret 2020. Seperti yang dapat

dilihat pada data yang diambil dari UNESCO pada gambar 2.3 dan 2.4, sekolah-sekolah yang ada di India telah ditutup selama 69 minggu yang mana durasi tersebut adalah durasi terlama sekolah ditutup di seluruh dunia (UNESCO, 2021).



Gambar 2. 3 Total Durasi Penutupan Sekolah Di India 2020-2021 (UNESCO, 2021).



Gambar 2. 4 Total durasi penutupan sekolah di India 2020-2021 (UNESCO, 2021).

2.2.1 Upaya Pemerintah India Untuk Pendidikan Anak Di masa Awal Covid

Dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di India, Pemerintah India membuat Kebijakan Pendidikan Nasional pertama pada tahun 1968 dan Kebijakan Pendidikan Nasional kedua dirumuskan pada tahun 1986. Kemudian, Pemerintah India telah menyetujui Kebijakan Pendidikan Nasional (NEP) 2020 pada bulan Juli 2020. Kebijakan Pendidikan Nasional yang diluncurkan pada tahun 2020 ini memiliki target pendidikan yang universal dimulai dari tingkat pra-sekolah hingga kelas 12. Kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk merangkul sekitar 20 juta anak laki-laki dan perempuan yang putus sekolah untuk kembali melalui sekolah terbuka. NEP 2020 bertujuan untuk meningkatkan pendidikan bagi semua anak, termasuk melalui sarana pembelajaran digital serta memastikan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang baik dan berkualitas untuk semua anak diantara umur 3-6 tahun juga merupakan tujuan penting yang ingin dicapai melalui Kebijakan Pendidikan Nasional (NEP) 2020 tersebut (UNICEF, 2020).

Kementerian Dalam Negeri India mengarahkan negara-negara bagian untuk membuka kembali sekolah mulai 15 Oktober 2020 dengan pendekatan secara bertahap di luar zona penahanan (UNICEF, 2020). Ada beberapa negara bagian di India seperti negara bagian Himachal Pradesh, Andhra Pradesh dan Uttarakhand sempat membuka kembali sekolah pada Bulan Oktober 2020, akan tetapi sekolah-sekolah yang sempat dibuka tersebut harus ditutup kembali dikarenakan ada sejumlah besar siswa dan guru telah terinfeksi Virus Covid. Kemudian, sekolah-sekolah di negara bagian seperti di Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Odisha, dan Karnataka akan dibuka kembali pada

Bulan Februari 2021 terutama bagi anak atau siswa yang duduk di kelas 9-12 dikarenakan mereka akan mengadakan ujian. Namun, jumlah kasus Covid meningkat drastis lagi pada Maret-April 2021 dengan gelombang kedua Covid di India (Sharma MD and Joshi Bams, 2021). Contohnya saja seperti di Andhra Pradesh, dalam seminggu pembukaan kembali sekolah, ada sekitar 829 guru dan 575 siswa dinyatakan positif Covid (UNICEF, 2021).

Pemerintah India juga telah melakukan berbagai upaya dan solusi melalui pembelajaran jarak jauh. Solusi komunikasi melalui Whatsapp, Youtube, TV, radio, serta menggunakan *platform e-learning* Pemerintah India seperti DIKHTSA, *e-Pathshala*, Swayam, *National Repository of Open Educational Resources* (NROER), Serta EdTech yang merupakan kolaborasi Pemerintah India dengan mitra LSM untuk memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif selama penutupan sekolah (UNICEF, 2021). Akan tetapi, usaha tersebut tidak mendapatkan hasil yang bagus dikarenakan para guru mengeluhkan bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi serta berinteraksi dengan baik dengan anak-anak melalui media pembelajaran daring tersebut. Banyak juga dari siswa terutama yang berada di daerah pedesaan tidak menerima materi pembelajaran daring dikarenakan jaringan yang tidak stabil dan kurangnya akses ke perangkat digital (UNICEF, 2021). Selain itu, banyak dari anak atau siswa yang mengalami permasalahan seperti tidak memiliki perangkat *gadget* seperti *smartphone* atau laptop pribadi, jaringan yang tidak stabil, tidak mampu berlangganan paket internet, tidak menerima materi pembelajaran serta tidak dapat memahami dengan baik materi yang diberikan melalui media pembelajaran daring (Swarupa Murali and Maiorano, 2021).

Ada lebih dari 80 persen siswa yang bersekolah di wilayah Odisha, Bihar, Jharkand, Chhattisgarh, dan Uttar Pradesh tidak menerima materi pembelajaran apapun selama lockdown. Hal itu dikarenakan keluarga tidak memiliki akses ke perangkat digital dan alat-alat e-learning (UNICEF, 2021). Aplikasi *Whatsapp* merupakan alat utama untuk mengakses pembelajaran jarak jauh yang digunakan dalam rumah tangga yang memiliki akses keperangkat digital, sekitar 75 persen digunakan untuk menyampaikan pendidikan di sekolah negeri dan swasta, 38 persen lagi digunakan untuk melakukan panggilan telepon antara guru dan siswa. Akan tetapi, lebih dari 75 persen orang tua mengalami masalah dengan pembelajaran melalui *Whatsapp* dikarenakan kurangnya koneksi internet atau ketidakmampuan membeli kuota internet, dan terkadang juga karena kecepatan atau sinyal internet yang buruk (UNICEF, 2021).

Dari penjelasan Di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 sampai 2021, Pandemi Covid telah menyebabkan darurat kesehatan masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal tersebut telah memengaruhi hampir semua negara dan wilayah secara global. Pandemi Covid tersebut telah menyebabkan darurat krisis hak anak dan gangguan parah pada kehidupan normal masyarakat di India termasuk anak-anak dengan adanya penutupan sekolah secara serentak di hampir seluruh negara bagian. Hal tersebut telah berpengaruh pada 286 juta anak di India. Penutupan sekolah yang diperpanjang menyebabkan hilangnya akses atau kesempatan belajar bagi anak-anak. Maka dari itu, UNICEF sebagai organisasi internasional yang bekerja untuk memperjuangkan hak-hak anak dan sekaligus menjadi mitra bagi India sejak tahun 1948 ikut membantu mengatasi permasalahan-permasalahan anak salah satunya di bidang pendidikan di India Di masa Covid.

2.3 Profil UNICEF dan Sejarah Masuknya UNICEF Di India

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) atau Dana Anak PBB adalah organisasi yang bernaung dibawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). UNICEF dibentuk pada tanggal 11 Desember 1946 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat. UNICEF awalnya dibentuk untuk membantu anak-anak di wilayah Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah yang hancur akibat dari perang. Saat itu, kepanjangan dari UNICEF masih menggunakan "*United Nations International Children's Emergency Fund*" atau Dana Darurat Anak Internasional PBB.

UNICEF mempunyai cabang di 190 negara dan wilayah, salah satunya India. UNICEF mulai bekerja di India pada tahun 1948. UNICEF telah ada di India selama 70 tahun terakhir ini. Ada sekitar 450 anggota staf yang ditempatkan di 17 negara. UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah India dan LSM yang ada di India dan berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah India dengan tujuan untuk memungkinkan setiap anak dapat berkembang menjadi lebih baik. UNICEF memastikan bahwa anak-anak di India mendapatkan fasilitas seperti air bersih, pendidikan, kesehatan dan perlindungan yang baik. UNICEF menjangkau langsung kepada keluarga untuk memastikan perkembangan anak-anak di sana. Secara umum, program-program UNICEF di India, yaitu :

1. Kesehatan,
2. Perlindungan Anak,
3. Pendidikan,
4. Nutrisi,
5. Air, Sanitasi dan Kebersihan,
6. Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial,

7. Pengembangan dan Partisipasi Remaja,
8. Kesetaraan Gender,
9. Perkembangan Anak Usia Dini (PAUD),
10. Pengurangan Resiko Bencana,
11. Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi,
12. Komunikasi Untuk Pembangunan, dan
13. Perubahan Iklim dan Pelestarian (UNICEF, 2020).

UNICEF berkomitmen dalam 4 prinsip kemanusiaan, yaitu:

1. Netralitas

UNICEF menyatakan untuk tidak terlibat dalam hal-hal atau permasalahan yang bersifat ras, agama atau ideologis, politik dan UNICEF juga tidak memihak dalam konflik atau permusuhan (UNICEF, 2022).

2. Ketidakberpihakan

UNICEF memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan dan tanpa diskriminasi yang berdasarkan pada etnis, ras, bahasa, kebangsaan, jenis kelamin, keyakinan agama, kelas, orientasi seksual, kecacatan, identitas gender, pendapat politik, ataupun yang lainnya (UNICEF, 2022).

3. Kemanusiaan

Dimanapun itu ditemukan, penderitaan manusia harus sesegera mungkin ditangani. Aksi atau tindakan kemanusiaan bertujuan untuk menjaga martabat dan menghormati manusia, menjaga serta melindungi kesehatan, dan menyelamatkan nyawa (UNICEF, 2022). UNICEF juga menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap anak perempuan, anak laki-laki, perempuan dan laki-laki dari semua kalangan umur berhak untuk diperlakukan secara

manusiawi dan berusaha untuk membantu serta melindungi setiap anak yang rentan dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat (UNICEF, 2022). dan,

4. Kemandirian

Aksi atau tindakan kemanusiaan harus otonom dari tujuan politik, ekonomi, militer ataupun tujuan yang lainnya yang mungkin dipegang oleh setiap aktor terkait dengan bidang di mana aksi atau tindakan kemanusiaan sedang dilakukan. UNICEF independen dari tujuan politik, ekonomi, militer, keamanan atau yang lainnya (UNICEF, 2022). Selain itu, pada saat didirikan secara global ditahun 1946 dan mulai bekerja di India ditahun 1948, UNICEF dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi atau badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak menerima dana Sekretariat PBB (UNICEF, 2020).

Pada tahun 1948 UNICEF mulai bekerja di India. Pada tahun 1950, Majelis PBB memberikan mandat kepada UNICEF untuk membantu anak-anak yang hidup dalam kekurangan. Kemudian, pada tahun 1953, mandat UNICEF semakin meluas yaitu dengan memenuhi kebutuhan anak-anak dinegara-negara berkembang dan kata “*international*” dan “*emergency*” dihapuskan dan organisasi internasional tersebut dan resmi menjadi “*United Nations Children’s Fund*” dan dijadikan organisasi internasional dibawah PBB yang khusus mengurus dan berdedikasi untuk anak-anak diseluruh dunia. (UNICEF, n.d.).

Kemudian, selain 4 prinsip kemanusiaan Di atas, UNICEF juga mengadopsi norma-norma yang ada dalam UN-CRC. Salah satu norma

dalam UN-CRC yang berkaitan langsung dengan hak anak, yaitu ada pada Pasal 28 yang mengatur tentang hak pendidikan anak yang berbunyi: “Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak” (UNICEF, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pasal 28 tersebut yang menjelaskan mengenai hak anak dalam untuk pendidikan yang layak dan berkualitas sebagai acuan bagi UNICEF dalam membantu meningkatkan pendidikan anak di India di masa Covid 2020-2022.

BAB 3

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNICEF DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDIA DI MASA COVID 2020-2022

Bab 3 akan menjelaskan mengenai pendekatan UNICEF dalam implementasi norma pendidikan anak di India Di masa Covid 2020-2022 dengan mengacu pada teori *International Organizations and Implementation* yang berisi tiga pendekatan organisasi internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan manajerial, dalam pengimplementasian norma pendidikan anak di India, UNICEF memenuhi implementasi *Monitoring* yaitu dengan adanya laporan pertanggungjawaban Pemerintah India kepada UNICEF India, Kerja sama UNICEF dengan IGO, Kerja sama UNICEF dengan NGO, dan Kerja sama UNICEF dengan Pemerintah India. Kedua, implementasi dengan cara peningkatan kapasitas dan *problem solving* melalui interpretasi aturan, bantuan teknis dan keuangan.

Penulis tidak menggunakan Pendekatan normatif (*Normative approach*) dikarenakan tidak mempersuasi India untuk mengubah kebijakan terkait pendidikan anak di India Di masa Covid. Penulis juga tidak menggunakan Pendekatan penegakan (*Enforcement approach*) dalam menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini dikarenakan India sebagai anggota sekaligus mitra Kerja sama dari organisasi internasional dalam hal ini UNICEF tidak melalaikan ataupun melanggar perjanjian internasional melainkan India bekerja sama dengan UNICEF dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak (UN-CRC) untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di India. India juga telah menyetujui secara sukarela terkait program-program yang dijalankan UNICEF di India.

3.1 Pendekatan Manajerial (*Management Approach*)

Ciri dari Pendekatan manajerial (*Management approach*) adalah lebih terbuka dan tidak memaksa, melalui pemecahan terhadap masalah, interpretasi aturan, pengembangan kapasitas serta adanya transparansi. Organisasi maupun lembaga yang ada didalamnya dapat berperan untuk ikut membantu implementasi yang mana hal tersebut dapat berguna untuk membantu mengembangkan kapasitas pengambilan keputusan bagi negara (Joachim, Reinaldi, and Verbeel, 2008).

Pendekatan manajerial (*Management approach*) memiliki beberapa cara yaitu organisasi internasional dapat melakukan pengawasan terhadap negara yang bersangkutan melalui laporan pemerintah negara, Kerja sama dengan NGOs, maupun komite khusus yang dibentuk (Joachim, Reinaldi, and Verbeel, 2008).

3.1.1 Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah India Kepada UNICEF India

Dalam Pasal 28 Konvensi Hak Anak (UN-CRC) menyatakan, “Negara-negara pihak memajukan dan mendorong Kerja sama internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya untuk membantu penghapusan kebodohan dan buta huruf” (OHCHR, 2020).

Pada tanggal 21 April 2022, NITI Aayog yang merupakan wadah pemikir kebijakan utama Pemerintah India bersama dengan UNICEF menandatangani Pernyataan niat atau *a Statement of Intent* (SoI) tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGS) dengan fokus pada anak-anak. SoI ini ditandatangani oleh Petugas SDGs India, Kepala Kebijakan Sosial UNICEF India, Perwakilan Penanggung Jawab UNICEF India dan Wakil

Ketua NITI Aayog. Berdasarkan pada komitmen bersama untuk mewujudkan hak-hak anak di India, Pernyataan niat atau *a Statement of Intent* (SoI) ini berusaha untuk menformalkan kerangka Kerja sama untuk meluncurkan dan mengembangkan laporan pertamanya mengenai '*State of India's Children: Status dan Trends in Multidimensional Child Development*' atau 'Anak-anak Negara Bagian India: Status dan Tren dalam Perkembangan Multidimensi Anak'.

Kerja sama yang dilakukan oleh NITI Aayog dan UNICEF India ini akan menyusun mengenai metode, analisis teknis, pelaporan dan perencanaan aksi untuk laporan tentang anak-anak di Negara India dengan berfokus kepada aspek multidimensi perkembangan anak seperti kesehatan, nutrisi, pendidikan, air dan sanitasi, perlindungan dan bidang-bidang terkait lainnya. Proyek ini akan dilakukan melalui pendekatan keseluruhan masyarakat India dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti Kementerian Persatuan, Pemerintah Negara Bagian, Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil dan Kelompok Hak Anak.

Meskipun masih dalam ditahap penandatanganan niat, Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional UNICEF dalam pengimplementasian norma pendidikan anak di India untuk membantu memperbaiki pendidikan anak di India Di masa Covid.

3.1.2 Kerja sama UNICEF dengan IGO

Kerja sama UNICEF dengan UNESCO, WHO, UNFPA, WFP

UNICEF memfasilitasi Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan dan Kementerian Kesehatan untuk ikut berpartisipasi dan membagikan masalah, pengalaman serta tantangan yang mereka hadapi dalam upaya pembukaan kembali

sekolah yang bersih, aman dan berkualitas bagi anak-anak di India pada pertemuan *Regional South East Asia Consultation* diselenggarakan bersama oleh UNESCO, WHO, UNFPA, dan WFP. UNICEF juga bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap rencana pembuatan strategi untuk membangun kembali sistem pendidikan yang lebih baik serta pemberian bantuan kepada orang tua, guru dan pengasuh dan pembagian protokol kesehatan dan keselamatan yang digunakan selama pembukaan kembali sekolah yang aman untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di masa Covid (UNICEF, 2020).

3.1.3 Kerja sama UNICEF dengan NGO

Kerja sama UNICEF dengan FCC *South Asia*

Pandemi Covid telah berkembang sebagai krisis hak anak. Dengan meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan, dua hal yang paling berdampak terhadap anak-anak di India adalah kesehatan dan pendidikannya. Kesenjangan digital terhadap anak-anak menjadi permasalahan, hanya sekitar seperempat rumah tangga (24 persen) di India yang memiliki akses ke internet dan adanya kesenjangan besar antara keluarga yang hidup di kota dan di desa (UNICEF, 200). Anak-anak yang tinggal di pemukiman terpencil bahkan ada yang tidak memiliki akses ke *smartphone* sehingga banyak sekali anak yang tidak dapat mengakses pembelajaran jarak jauh selama penutupan sekolah berlangsung. UNICEF menyelenggarakan diskusi panel media online dalam kerja samanya dengan *The Foreign Correspondents Club of South Asia* (FCC) pada tanggal 17 November 2020 yang berjudul "*Impact of Covid-19 Crisis on the Lives of Children in India*". Diskusi panel *online* tersebut dihadiri oleh Perwakilan UNICEF India, *President of FCC*,

Sekretaris FCC, Direktur sekaligus Pendiri dari *Language and Learning Foundation*, Pendiri dan Penasehat HAQ *Center for Child Rights* (UNICEF, 2020).

Dalam diskusi panel *online* tersebut, UNICEF sebagai organisasi internasional bertugas untuk memantau adanya dampak sosial dan ekonomi dari pandemi Covid ini terhadap anak-anak di India. Para perwakilan dari NGO di yang bekerja di India melaporkan dengan adanya Covid ini anak-anak kesulitan untuk mengakses pembelajaran jarak jauh selama penutupan sekolah, terutama bagi anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan dan terpinggirkan kesulitan untuk mendapatkan akses internet dan tidak memiliki akses ke *gadget* atau *smartphone*.

Tujuan dari diadakannya diskusi panel media *online* ini adalah untuk menekankan perlunya memperbaiki dan memperkuat pendidikan dan dapat diakses oleh semua anak-anak terutama dikarenakan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya yang ditutup di masa pandemi Covid sebagai bentuk upaya untuk mengupayakan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan norma yang ada pada UN-CRC. Selain itu, melalui diskusi tersebut, ajakan untuk mengkampanyekan pembukaan kembali sekolah-sekolah yang sempat ditutup untuk membuka peluang bagi anak-anak dengan berinvestasi pada pendidikan yang adil, berkualitas dan pengembangan keterampilan untuk memastikan seluruh generasi anak-anak mendapatkan masa depan yang lebih baik dan memastikan kesejahteraan psikososial anak-anak (UNICEF, 2020).

3.1.4 Kerja sama UNICEF dengan Pemerintah India

Mengasuh dan mengajari anak-anak menjadi tantangan bagi orang tua di India selama pandemi Covid. Masih banyak anak-anak yang belum bisa

menggunakan dan mengakses teknologi untuk pembelajaran mereka dari rumah selama penutupan sekolah masih berlangsung. Selama penutupan sekolah berlangsung, ada sekitar 800.000 anak di Chhattisgarh yang mana mereka biasanya menghadiri lebih dari 50.000 Anganwadi (pusat penitipan dan pembelajaran untuk anak usia 3 – 6 tahun yang merupakan yang sudah ada sejak 1975 dan bagian dari program ICDS) sebelum Pemerintah India memberlakukan *lockdown* di India yang mana akhirnya anak-anak tersebut kehilangan kesempatan belajar mereka karena adanya Pandemi Covid yang akhirnya menyebabkan pusat belajar mereka (sekolah) ditutup (UNICEF, 2020).

UNICEF membantu memenuhi kebutuhan belajar bagi anak-anak di India selama Covid. UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah India dari Departemen Perempuan dan Perkembangan Anak untuk mengadakan Kampanye “Chakmak” untuk membantu mendukung orang tua agar dapat memastikan anak-anak mereka tetap melakukan aktivitas belajar dari rumah untuk membantu menjangkau anak-anak melalui para Anganwadi mereka untuk belajar dari rumah. Kampanye tersebut dipimpin oleh 700 reporter dan jurnalis untuk anak-anak dari *The Media Collective for Child Rights* (Hasil kolaborasi CSMR Foundation dan Kantor Negara UNICEF di Chhattisgarh untuk fokus mempromosikan masalah Hak Anak). Mereka menyediakan daftar kegiatan dan tugas yang dapat dilakukan oleh anak-anak bersama dengan orang tua mereka. Selain itu, Kampanye Chakmak ini diadakan dengan tujuan untuk ikut memastikan bahwa anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat dapat memiliki kesempatan dan akses belajar terlepas dari akses belajar yang berbasis teknologi maupun *online* (UNICEF, 2020). Dalam upayanya untuk mensukseskan kampanye tersebut, UNICEF dan Pemerintah India tersebut

mendapatkan dukungan tambahan yang diberikan oleh Pemerintah India, jaringan media, pemuda, administrasi sekolah, dan lain-lain, ada sekitar lebih dari 1 juta anak-anak di Chhattisgarh mendapat manfaat dari adanya kampanye tersebut. Wartawan dan jurnalis tersebut membagikan foto anak-anak yang telah menyelesaikan tugas di halaman Facebook kampanye yang disebut '*Chakmak Abhiyan*'. Skema Layanan Nasional Chattisgarh yang memiliki lebih dari 100.000 sukarelawan dan 400.000 anggota dari Kongres Pemuda juga bergabung dan ikut mensukseskan Kampanye Chakmak tersebut.

Meningkatnya kasus Covid pada gelombang kedua menyebabkan sekolah dan pusat pembelajaran serta pengembangan anak usia dini telah memengaruhi pembelajaran sekitar 286 juta anak di India. UNICEF mendukung sekitar 10 juta orang tua untuk membantu menciptakan lingkungan belajar dari rumah bagi anak-anak. UNICEF juga bersama dan mendukung Kemendikbud untuk membagikan *platform e-learning* digital gratis dari Pemerintah India seperti DIKHSa, *e-Pathshala*, *National Repository of Open Educational Resources* (NROER), SWAYAM, SWAYAM PRABHA dan EdTech yang berisi materi pembelajaran berupa audio maupun video yang berguna bagi siswa sekolah dasar sampai menengah, guru maupun orang tua dalam mengakses pembelajaran secara daring selama pandemi (UNICEF, 2020).

3.2 Peningkatan Kapasitas dan *Problem Solving* UNICEF Untuk Pendidikan Anak di India

Dalam Pendekatan manajerial (*Management approach*) juga terdapat *capacity building* yang mana organisasi internasional dapat melakukan peningkatan

kapasitas pada keamanan, hukum, serta penjagaan pada perbatasan kepada negara yang bersangkutan. Sebelum itu, organisasi internasional akan melihat keadaan yang terjadi terlebih dahulu kemudian organisasi internasional akan mengadakan diskusi dengan para ahli dan memberikan saran terbaik kepada negara yang bersangkutan. Kemudian, ada *problem solving* dengan memberikan bantuan teknis maupun keuangan kepada negara yang bersangkutan (Joachim, Reinaldi, and Verbeel, 2008).

3.2.1 Interpretasi aturan UNICEF Melalui Pembuatan UNICEF *Strategic Plan* 2018-2021

Dalam Konvensi Hak Anak (UN-CRC) menyatakan, “Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran rutin di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah” (OHCHR, 2020).

UNICEF membuat UNICEF *Strategic Plan* 2018-2021 (UNICEF, 2018). Dengan merujuk kepada UN-CRC atau Konvensi Hak Anak PBB, UNICEF membuat UNICEF *Strategic Plan* 2018-2021 menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk anak-anak diseluruh negara di dunia, termasuk anak-anak di India. Untuk mencapai tujuan tersebut, UNICEF bersama dan didukung oleh PBB, pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra swasta lainnya. Dengan merujuk pada UN-CRC atau Konvensi Hak Anak PBB, dalam *Strategic Plan* tersebut, UNICEF menetapkan bahwa ada lima hal yang ingin dituju (UNICEF, 2018), yaitu :

1. Setiap anak berhak untuk tumbuh sehat dan kuat serta berkembang dengan baik (UNICEF, 2018).

2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan belajar yang berkualitas sejak dini (UNICEF, 2018).
3. Setiap anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi dan pelecehan (UNICEF, 2018).
4. Setiap anak hidup dalam lingkungan yang bersih dan aman yang berguna bagi pertumbuhan dan keselamatannya (UNICEF, 2018).
5. Setiap anak memiliki kesempatan yang adil dalam hidup (UNICEF 2018).

3.2.2 Interpretasi Aturan UNICEF dengan memberikan Materi “*Psychosocial Support for Children during Covid-19*”

Dalam Pasal 29 (a) Konvensi Hak Anak (UN-CRC) menyatakan, “Pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak hingga potensi penuhnya” (OHCHR, 2020).

Dengan adanya Pandemi Covid yang meluas keberbagai negara termasuk India telah berdampak tidak hanya keadaan kesehatan dan ekonomi, akan tetapi juga berdampak pada kondisi psikososial masyarakat khususnya anak-anak. *Lockdown* yang diterapkan oleh Pemerintah India telah membatasi akses sosialisasi, kontak fisik, aktivitas bermain, dan perkembangan psiko-sosial mereka. Penutupan sekolah menyebabkan terhambatnya akses anak-anak untuk belajar dan berinteraksi dengan teman-temannya sehingga mereka mengalami kecemasan terhadap kondisi tersebut (UNICEF, 2020). Maka dari itu, UNICEF mengunggah materi maupun informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Pandemi Covid di India. Salah satu bentuk materi informasi yang diunggah oleh UNICEF di

website resmi yang dapat diakses oleh masyarakat India adalah materi yang berjudul “*Psychosocial Support for Children during Covid-19*” yang dikembangkan dan juga untuk mendukung CHILDLINE yang merupakan bagian *Minister of Woman and Child Development* (MWCD) yang merupakan Pemerintah India (UNICEF, 2020). UNICEF mengunggah materi ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk orang tua dan pengasuh serta anak-anak itu sendiri sehingga memungkinkan bagi mereka untuk memahami apa itu Covid dan bagaimana cara untuk mencegah serta mengelola rasa takut dan cemas yang dirasakan oleh anak-anak khususnya pada situasi yang sedang mereka hadapi di masa Covid (UNICEF, 2020).

3.2.3 Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan

Dalam Konvensi Hak Anak (UN-CRC) menyatakan, “Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran rutin di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah” (OHCHR, 2020).

Meskipun sekolah-sekolah ditutup akibat Covid, *Whatsapp* adalah alat yang paling umum atau paling sering digunakan oleh guru dan siswa dan siswa dalam proses pembelajaran 47-55 persen anak atau siswa dan 86 persen guru menyatakan bahwa mereka menggunakan *whatsapp* untuk mengajar pembelajaran jarak jauh. Sejumlah besar guru (sekitar 20 persen guru) tidak dapat terhubung dengan baik dengan siswa dan sekitar 36 persen guru kekurangan akses ke perangkat digital contohnya komputer yang menyebabkan hambatan dalam proses mengajar dikarenakan tidak memiliki akses pribadi ke komputer, laptop atau *smartphone* (UNICEF, 2020).

Pemerintah negara bagian yang didukung oleh UNICEF memberikan pelatihan kepada guru-guru agar dapat memberikan *e-learning* dan pembelajaran jarak jauh kepada semua siswa dengan lebih baik lagi melalui *smartphone* atau laptop/komputer (UNICEF, 2021). Para guru juga diberikan fasilitas *hotspot* di daerah-daerah dengan konektivitas jaringan yang buruk (UNICEF, 2020).

Dalam mencapai pemenuhan kebutuhan belajar anak pada Di masa Covid, UNICEF juga melakukan kerja sama dengan Direktorat Samagra Shiksha di Wilayah Jammu dan Kashmir untuk memberikan pelatihan kepada sekitar 2.000 kepala lembaga dan kepala sekolah untuk memberikan bantuan dukungan psiko-sosial bagi kesehatan mental dan kesejahteraan bagi siswa, guru dan orang tua selama Covid (UNICEF, 2021). UNICEF juga bekerja sama Kementerian Pendidikan memberikan pelatihan kepada 12.178 sekolah diberbagai negara bagian untuk mengembangkan panduan, modul elektronik dan protokol sekolah yang aman untuk mendukung dan mempromosikan perilaku yang sesuai dengan kondisi Covid (UNICEF, 2021).

Untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak, UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah negara bagian, LSM, India Childline, Institut Nasional Kesehatan Mental dan Ilmu Neuro (*the National Institute of Mental Health and Neuro Science*), Otoritas Manajemen Bencana Nasional (*the National Disaster Management Authority*) dan Otoritas Perlindungan Anak untuk mengembangkan manual pelatihan untuk perawatan psiskososial untuk anak selama penutupan sekolah berlangsung dan memberikan pelatihan kepada para relawan dan pengasuh untuk anak-anak selama penutupan sekolah di masa Covid. UNICEF juga bekerja sama dengan Pemerintah India untuk mendukung pemberian pelatihan kepada

pengasuh dan menyiapkan serta membantu mendistribusikan manual kegiatan untuk meningkatkan hak anak untuk bermain dan hak anak untuk belajar selama Covid (USAID et al., 2022).

3.2.4 Bantuan Teknis UNICEF Kepada Negara Bagian

Dalam Pasal 28 (a) Konvensi Hak Anak (UN-CRC) menyatakan, “Mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan, membuatnya tersedia dan dapat diakses oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti pengenalan pendidikan Cuma-Cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika diperlukan” (OHCHR, 2020).

UNICEF juga menargetkan sekitar 41,3 juta anak dari 60 juta anak di 17 negara bagian dengan memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah India dan Pemerintah negara bagian untuk mengembangkan konten-konten digital digunakan untuk memuat materi pembelajaran melalui radio, TV dan media digital lainnya untuk pembelajaran siswa dan melalui dukungan orang tua dan guru (UNICEF, 2020). UNICEF juga memberikan bantuan teknis kepada Kementerian Pendidikan dan negara bagian untuk mengembangkan modul dan panduan mengenai pembukaan kembali sekolah dan pusat pengembangan anak usia dini yang aman, panduan mengenai air dan sanitasi yang berkaitan dengan kebersihan serta membrikan bantuan teknis kepada negara bagian untuk mengembangkan dan menerapkan program pemulihan pembelajaran bagi 15,83 juta anak negara (UNICEF, 2021).

Kemudian, UNICEF juga memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Chhattisgarh dalam Program ‘Sajag’ yang dipimpin oleh *The Media Collective for*

Child Rights yang merupakan media kolektif yang terdiri dari lebih dari 700 wartawan dan jurnalis untuk anak-anak yang dilakukan di tingkat kabupaten dan desa. Para reporter dan jurnalis telah memberikan daftar kegiatan dan tugas yang dapat dilakukan bersama oleh orang tua dan anak-anak (UNICEF, 2020). Program tersebut yang bertujuan untuk membantu para Angawadi dan sukarelawan mendukung orang tua dan pengasuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka selama berada di rumah.

UNICEF juga memberikan dukungan melalui bantuan teknis untuk pembangunan fasilitas WASH dan pemberian desinfeksi kepada lebih dari 10.000 sekolah 50 pusat Anganwadi di Bihar, Gujarat dan Uttar Pradesh (UNICEF, 2021). Bantuan ini berguna untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman selama proses pembelajaran anak dilakukan di sekolah.

UNICEF memberikan bantuan teknis kepada pemerintah negara bagian yang berguna untuk mempercepat kampanye *back-to-school* atau pembukaan kembali sekolah, pengembangan pedoman untuk pembukaan kembali sekolah yang aman, program perbaikan serta peningkatan untuk mengatasi dan mengurangi kehilangan pembelajaran yang dirasakan oleh anak akibat penutupan sekolah yang berkepanjangan (UNICEF, 2022).

3.2.5 Bantuan Keuangan UNICEF

Dalam Pasal 28 (a) Konvensi Hak Anak (UN-CRC) menyatakan, “Mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan, membuatnya tersedia dan dapat diakses oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat

seperti pengenalan pendidikan Cuma-Cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika diperlukan” (OHCHR, 2020).

Selain dukungan dan bantuan teknis, UNICEF juga memberikan keuangan kepada tiap negara bagian sebesar \$25.000 untuk mengembangkan panduan guru dan lembar kerja untuk siswa di Sekolah Dasar untuk membantu pemulihan pembelajaran. Secara keseluruhan, sekitar \$1.000.000 telah diberikan oleh UNICEF untuk membantu anak-anak di India dalam bidang pendidikan (UNICEF, 2022).

Melalui dukungan, bantuan teknis dan bantuan keuangan tersebut, di Bihar, sekitar 1,5 juta anak komunitas minor telah dijangkau oleh Dewan Pendidikan Madrasah Bihar, sekitar 47.907 anak dari komunitas ‘Muharrar’ yang terpinggirkan dapat melanjutkan belajar dengan mengakses materi belajar melalui pusat pembelajaran keliling. Selain itu, melalui “Pusat Pembelajaran Seluler” yang diharapkan dapat memastikan kesinambungan pembelajaran bagi anak-anak yang tidak memiliki akses ke perangkat digital dalam jenis apapun dan telah menjangkau 28.000 anak (UNICEF, 2021). Di Uttar Pradesh, UNICEF bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Sekolah dan Departemen Pengembangan Perempuan dan Anak menjalankan kursus online yang berguna untuk meningkatkan kualitas Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 87.501 anak-anak penyandang disabilitas (58 persen perempuan) termasuk anak-anak dengan kelainan berat dan ganda, penyandang disabilitas melanjutkan pendidikannya. Di Rajasthan, dengan bantuan teknis dari UNICEF, program percepatan pembelajaran membantu dalam meningkatnya pembelajaran dari 4.500 anak (55 persen perempuan) di 140 lokasi terpencil melalui 140 Shiksha Sahayati (60 persen perempuan). Di Maharashtra dan

Assam, sekitar 3,5 juta anak (48 persen perempuan) mendapat manfaat dari keterampilan membaca dan melek huruf melalui program membaca. Di Maharashtra, dengan bantuan teknis, 3,26 juta anak usia sekolah dasar dijangkau dalam kampanye yang dilaksanakan untuk mempromosikan “Membaca untuk kesenangan” (UNICEF, 2022). Di Odisha, 78.000 anak (46 persen perempuan) di daerah terpencil secara geografis dijangkau melalui 9.800 calon guru melalui program magang yang inovatif (UNICEF, 2021). Sekitar 20.000 anak dijangkau melalui Program ‘Sanjog’ Sekolah Inovatif (Sekolah dengan menggunakan mobil van atau sepeda) untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran anak-anak dari masyarakat yang rentan (UNICEF, 2022). Di Chhattisgarh, 1.054.500 anak (51 persen perempuan) dari distrik suku dan mendapat manfaat dari pembelajaran berbasis masyarakat dengan bantuan teknis yang diberikan UNICEF serta difasilitasi oleh 14.790 sukarelawan terlatih. Di Jammu dan Kashmir, 123.000 anak-anak melanjutkan pembelajaran mereka melalui pembelajaran jarak jauh dan pusat pembelajaran komunitas dengan bantuan teknis dari UNICEF yang didukung oleh sukarelawan. Di Jharkhand, dengan bantuan teknis dari UNICEF, 200.000 anak melanjutkan belajar melalui mobil van keliling dan kamp pembelajaran komunitas (UNICEF, 2022).

Tabel 3. 1 Anggaran Program UNICEF untuk Anak di India Tahun 2022 (UNICEF, 2022).

Sektor	Disagregasi	Total Kebutuhan	Target 2022	Total Hasil
Kesehatan				
<ul style="list-style-type: none"> Anak dan perempuan yang mengakses layanan kesehatan primer difasilitas yang didukung UNICEF Penyediaan layanan kesehatan terlatih dalam deteksi, rujukan, dan pengelolaan kasus Covid 	Total	21 Juta	30 Juta	26,637,508
	Total		505.000	21.423
Perlindungan Anak				
<ul style="list-style-type: none"> Anak dan pengasuh mengakses kesehatan mental dan dukungan psiko-sosial 	Total		690,270	664,600
	Anak perempuan			100,188
	Anak laki-laki			101,985
	Tidak terpilih (Anak-anak)			24,585
	Wanita			83,316
	Pria			70,824

<ul style="list-style-type: none"> Anak perempuan, anak laki-laki, dan perempuan yang mengakses mitigasi risiko kekerasan berbasis gender, pencegahan atau intervensi respons 	Tidak terpilih (pengasuh)	12,5 juta Anak	1,538,150	283,702
	Total			1,032,548
	Anak perempuan			291,286
	Anak laki-laki			244,288
	Wanita			403,864
	Tidak terpilih			93,110
	<ul style="list-style-type: none"> Anak tanpa pendamping dan terpisah dan dipersatukan kembali dengan pengasuh utama mereka atau diberikan layanan pengasuhan atau pengasuhan alternatif berbasis keluarga 			Total
Anak perempuan		22,652		
Anak laki-laki		20,818		
Pendidikan				
<ul style="list-style-type: none"> Anak mengakses pendidikan formal maupun no-formal, termasuk pendidikan dini Sekolah menerapkan protokol sekolah aman 	Total	286 Juta	19,000,000	7,790,000
	Anak perempuan			3,860,000
	Anak laki-laki			3,930,000
	Total			54,100
WASH				

<ul style="list-style-type: none"> Orang dijangkau dengan program perubahan perilaku cuci tangan 	Total		11,507,860	2,860,577
<ul style="list-style-type: none"> Orang dijangkau dengan pasukan air, sanitasi, dan kebersihan yang kritis dan layanan 	Total	30,6 Juta	7,785,970	1,973,742
<ul style="list-style-type: none"> Petugas dan penyedia layanan kesehatan yang terlatih dalam pencegahan dan pengendalian infeksi 	Total		204,642	56,730

*keterangan: Juta (\$) Dollar

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

India menjadi negara dengan jumlah penduduk terpadat kedua di dunia. India juga menjadi salah satu negara berkembang yang menduduki peringkat kelima dengan ekonomi terbesar di dunia. Akan tetapi, India masih memiliki berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan anak, salah satunya adalah kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Faktor sosial-ekonomi juga menjadi faktor pendukung anak-anak di sana kurang memiliki akses terhadap pendidikan. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah India mengeluarkan Undang-Undang, kebijakan maupun program yang mengatur tentang pendidikan anak dini yang bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak agar dapat menerima pelajaran ataupun materi dengan baik di sekolah dasar sampai menengah.

Kemudian, pandemi Covid muncul dan menjadikan India sebagai negara dengan kasus Covid tertinggi kedua di dunia pada awal tahun 2021. Hal tersebut semakin memperparah kondisi pendidikan serta akses belajar anak seperti dengan adanya *lockdown* dan penutupan sekolah selama kurang lebih 69 minggu membuat anak harus tetap tinggal di rumah dan tidak dapat bersekolah seperti biasa. Melihat hal tersebut, perlu adanya bantuan dari organisasi internasional untuk membantu memulihkan keadaan menjadi normal kembali. India juga merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak (UN-CRC) yang berisi mengenai hak-hak anak termasuk hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak PBB (UN-CRC) telah melakukan implementasi terhadap norma pendidikan dan ikut berkontribusi untuk menangani serta memperjuangkan hak-hak anak sekaligus juga telah menjadi mitra dan bekerja sama dengan Pemerintah India ikut membantu untuk memperjuangkan hak anak di India untuk mendapatkan kesempatan belajar yang layak dan berkualitas di masa Covid. Implementasi UNICEF di India menggunakan Pendekatan manjerial (*Management approach*) melalui penandatanganan niat untuk membuat laporan pertanggung jawaban Pemerintah India (NITI Aayog) terhadap UNICEF mengenai kondisi dan perkembangan pendidikan anak di India, kerja sama UNICEF dengan IGO melalui pertemuan *Regional South East Asia Consultation* diselenggarakan bersama oleh UNESCO, WHO, UNFPA, dan WFP. Kerja sama dengan NGO melalui diskusi panel media *online* dalam kerja samanya dengan *The Foreign Correspondents Club of South Asia* (FCC) pada tanggal 17 November 2020 yang berjudul “*Impact of Covid-19 Crisis on the Lives of Children in India*”, serta UNICEF melakukan pemantauan dalam pertemuan ataupun diskusi tersebut. UNICEF juga bekerja sama dengan Pemerintah India dengan mengadakan Kampanye ‘Chakmak’ di Chhattisgarh dan membagikan *platform e-learning* digital gratis dari Pemerintah India seperti DIKHSA, *e-Pathshala*, *National Repository of Open Educational Resources* (NROER), SWAYAM, SWAYAM PRABHA dan EdTech yang berisi materi pembelajaran berupa audio maupun video yang berguna bagi siswa sekolah dasar sampai menengah, guru maupun orang tua dalam mengakses pembelajaran secara daring di masa Covid.

Kemudian, UNICEF melakukan *capacity building* atau peningkatan kapasitas melalui interpretasi aturan yang ditandai dengan pembuatan UNICEF *Strategic Plan 2018-2021* dan UNICEF membagikan materi “*Psychosocial Support for Children during Covid-19*” lewat *website* resmi UNICEF yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk orang tua dan pengasuh serta anak-anak itu sendiri sehingga memungkinkan bagi mereka untuk memahami apa itu Covid dan bagaimana cara untuk mencegah serta mengelola rasa takut dan cemas yang dirasakan oleh anak-anak khususnya pada situasi yang sedang mereka hadapi di masa Covid. Kemudian, UNICEF juga memberikan pelatihan kepada guru-guru agar dapat memberikan *e-learning* dan pembelajaran jarak jauh kepada semua siswa dengan lebih baik lagi melalui *smartphone* atau laptop/komputer. Para guru juga diberikan fasilitas *hotspot* di daerah-daerah dengan konektivitas jaringan yang buruk, memberikan pelatihan kepada sekitar 2.000 kepala lembaga dan kepala sekolah untuk memberikan bantuan dukungan psiko-sosial bagi kesehatan mental dan kesejahteraan bagi siswa, guru dan orang tua selama Covid di wilayah Jammu dan Kashmir, memberikan pelatihan kepada 12.178 sekolah diberbagai negara bagian untuk mengembangkan panduan, modul elektronik dan protokol sekolah yang aman untuk mendukung dan mempromosikan perilaku yang sesuai dengan kondisi Covid. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah negara bagian, LSM, India Childline, Institut Nasional Kesehatan Mental dan Ilmu Neuro (*the National Institute of Mental Health and Neuro Science*), Otoritas Manajemen Bencana Nasional (*the National Disaster Management Authority*) dan Otoritas Perlindungan Anak untuk mengembangkan manual pelatihan untuk perawatan psikososial untuk anak selama penutupan

sekolah berlangsung dan memberikan pelatihan kepada para relawan dan pengasuh untuk anak-anak selama penutupan sekolah di masa Covid. UNICEF juga bekerja sama dengan Pemerintah India untuk mendukung pemberian pelatihan kepada pengasuh dan menyiapkan serta membantu mendistribusikan manual kegiatan untuk meningkatkan hak anak untuk bermain dan hak anak untuk belajar selama Covid.

Selain itu, UNICEF melakukan *problem solving* atau pemecahan masalah yang ditandai dengan UNICEF memberikan bantuan teknis dan bantuan keuangan kepada negara-negara bagian seperti di Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Assam, Odisha, Chhattisgarh, Jammu, Kashmir, Jarkhand untuk membantu mengupayakan pemenuhan kebutuhan belajar anak-anak di India akibat penutupan sekolah selama Covid. Dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak di India di masa Covid, UNICEF telah memberikan kontribusi dalam membantu anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran selama penutupan sekolah selama masa Covid.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan Di atas, penelitian ini lebih berfokus pada bidang pendidikan khususnya bagi anak-anak yang yang terkena imbasnya secara langsung seperti tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa di sekolah dikarena sekolah maupun tempat belajar lainnya harus ditutup akibat Covid yang menyebar di India.

Akan tetapi, penulis menyadari bahwa masih memiliki kekurangan dalam penulisan penelitian ini. Penulis masih menggunakan data sekunder yang

didapatkan dari *website* resmi UNICEF, Pemerintah India, dan *website* lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penulis kurang menjelaskan secara keseluruhan mengenai bantuan dan program yang diberikan oleh UNICEF di India. Kemudian, penulis kesulitan mendapatkan data dari keseluruhan negara bagian di India mengenai pendidikan anak khususnya selama Covid (2020-2022). Namun, hal tersebut dapat dikembangkan lagi oleh penelitian-penelitian terbaru kedepannya. Peneliti lainnya dapat mengkaji dengan menggunakan data primer yang dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan UNICEF, Pemerintah India, organisasi-organisasi yang relevan ataupun masyarakat di India. Teori, model atau pendekatan lainnya juga dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut agar menemukan pandangan yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Joachim, Jutta, Bob Reinaldi, and Bertjan Verbeel. 2008. *International Organizations and Implementation*. Taylor & Francis e-Library.

Jurnal

Biswas, Soutik. 2022. "Covid-19: Should India be bracing for a fourth wave?" *BBC News*, March 23, 2022, sec. India. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-60832236>.

Eboo Alwani, Sabilah. 2019. "Early Childhood Education in India: A Possible Investment in Better Outcomes? A Quantitative Analysis Using Young Lives India" 6: 123–50.

Kumar N Vellymalay, Suresh. 2011. "A Study of The Relationship Between Indian Parent's Education Level and Their Involvement in Thei Children's Education" 29 (2): 47–65.

Kusuma, Erzalina Widya, Djatmiko Djatmiko, and Resa Rasyidah. 2021. "Pandemi dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Kasus Peran Unicef di Yaman pada Masa COVID-19." *Transformasi Global* 8 (2): 189–204. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2021.008.02.7>.

Oktadewi, Nori, and Khairiyah. 2018. "Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking Di Indonesia." *Journal of Islamic World and Politics* 2 (2). <https://doi.org/10.18196/jiwp.2220>.

Martha, Jessica. 2020. "Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19," 10.

Sharma MD, Dheeraj, and Poonam Joshi Bams. 2021. "Reopening Schools in India During The Covid-19 Pandemic." *Oxford Univesity*, 1–3. <https://doi.org/10.1093/tropej/fmab033>.

- Sharma, Shalendra D. 2022. "India's Fight against the COVID-19 Pandemic: Lessons and the Way Forward." *India Quarterly: A Journal of International Affairs* 78 (1): 9–27. <https://doi.org/10.1177/09749284211068470>.
- Swarupa Murali, Vani, and Diego Maiorano. 2021. "Education during the COVID-19 Pandemic in India – NUS Institute of South Asian Studies (ISAS)." ISAS (Institute of South Asian Studies. 2021. <https://www.isas.nus.edu.sg/papers/education-during-the-covid-19-pandemic-in-india/>.
- Verma, Amita. 1994. "Early Childhood Care and Education in India" 2 (2): 31–42. <https://doi.org/10.1080/0966976940020103>.

Laporan

- UNESCO. 2014. "Global Initiative on Out-of-School Children." UNICEF Regional Office for South Asia. <https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/out-of-school-children-south-asia-country-study-education-2014-en.pdf>.
- UNESCO. 2021. "Education: From School Closure to Recovery | UNESCO." 2021. <https://www.unesco.org/en/covid-19/education-response>.
- UNICEF. 2015. "Educate All Girls and Boys in South Asia (The Global Out-of-School Children Initiative)." <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED573877.pdf>.
- UNICEF. 2020. "Rapid Assessment Of Learning During School Closures In The Context Of Covid." India: UNICEF India Country Office. <https://www.unicef.org/india/media/6121/file/Report%20on%20rapid%20assessment%20of%20learning%20during%20school%20closures%20in%20context%20of%20COVID-19.pdf>.
- UNICEF. 2020. "UNICEF India COVID-19 Situation Report No. 6." 2020. <https://www.unicef.org/india/reports/unicef-india-covid-19-situation-report-no-6>.

- UNICEF. 2020. "UNICEF India Covid-19 Situation Report No. 8."
<https://www.unicef.org/india/reports/unicef-india-covid-19-situation-report-no8>.
- UNICEF. 2020. "UNICEF India COVID-19 Situation Report No.8." 2020.
<https://www.unicef.org/india/reports/unicef-india-covid-19-situation-report-no8>.
- UNICEF. 2020. "Country Office Annual Report 2020."
<https://www.unicef.org/media/100301/file/India-2020-COAR.pdf>.
- UNICEF. 2021. "COVID-19 Pandemic Situation Report No. 1." 2021.
<https://www.unicef.org/india/reports/covid-19-pandemic-situation-report-no-1>.
- UNICEF. 2021. "India Covid-19 Situation Report 31 December 2021."
- USAID, GHR Foundation, MacArthur Foundation, and CWWC. 2022. "The Impact of COVID-19 on Children's Care India." Global Case Study Series.
https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/202210/case_study_india_covid19_final.pdf.

Penelitian

- Marthadyta, Tiara. 2022. "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Mengatasi Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Di India Pada Tahun 2014-2018." Dspace UII.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39193/18323005.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Nurhayati Inayatul, Maula. 2014. "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak Di India Periode Tahun 2010-2012."
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27538/1/NURHAYATI%20INAYATUL%20MAULA-FSH.pdf>.

Website

- Department of School Education & Literacy. 2021. "Right to Education | Ministry of Education, GoI." 2021. <https://dse.education.gov.in/rte>.
- DSEL. 2021. "Right to Education | Ministry of Education, GoI." 2021. <https://dse.education.gov.in/rte>.
- GoI. 2009. "Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme." 2009. <http://icds-wcd.nic.in/icds.aspx>.
- GoI. 2013. "National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy." <https://wcd.nic.in/sites/default/files/National%20Early%20Childhood%20Care%20and%20Education-Resolution.pdf>.
- GoI. 2017. "About DIKSHA." DIKSHA - Government of India. 2017. <https://diksha.gov.in/about/>.
- Legislative Department of India. 2018. "The Constitution (Eighty-Sixth Amendment) Act, 2002|Legislative Department | Ministry of Law and Justice | GoI." 2018. <https://legislative.gov.in/constitution-eighty-sixth-amendment-act-2002>.
- OHCHR. 2020. "Convention on the Rights of the Child." OHCHR. 2020. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.
- Perappadan, Bindu Shajan. 2020. "India's First Coronavirus Infection Confirmed in Kerala - The Hindu." THE HINDU. 2020. <https://www.thehindu.com/news/national/indias-first-coronavirus-infection-confirmed-in-kerala/article61638034.ece>.
- pwn. 2022. "Populasi Terbanyak di Dunia, India Bakal Salip China pada 2023." internasional. 2022. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220712130043-134-820421/populasi-terbanyak-di-dunia-india-bakal-salip-china-pada-2023>.
- SAMARPAN. 2022. "Top 5 Issues Which Children Struggle With In India." Samarpan. April 18, 2022. <https://www.samarpankmc.com/2022/04/top-5-issues-which-children-struggle-with-in-india/>.

- Sharma MD, Dheeraj, and Poonam Joshi Bams. 2021. "Reopening Schools in India During The Covid-19 Pandemic." *Oxford Univesity*, 1–3. <https://doi.org/10.1093/tropej/fmab033>.
- UNICEF. 2017. "Supporting Adolescent Transition to Adulthood: What Works and What Doesn't." <https://www.unicef.org/india/media/2526/file/Supporting-Adolescent-Transition-to-Adulthood.pdf>.
- UNICEF. 2018. "UNICEF Strategic Plan 2018-2021." https://www.unicef.org/media/48126/file/UNICEF_Strategic_Plan_2018-2021-ENG.pdf.
- UNICEF. 2019. "175 Million Children Are Not Enrolled in Pre-Primary Education – UNICEF." 2019. <https://www.unicef.org/india/press-releases/175-million-children-are-not-enrolled-pre-primary-education-unicef>.
- UNICEF. 2020. "Amidst child rights crisis, experts call to 'reimagine' a sustainable, safer world for children." 2020. <https://www.unicef.org/india/press-releases/amidst-child-rights-crisis-experts-call-reimagine-sustainable-safer-world-children>.
- UNICEF. 2020. "Chakmak keeps children learning and engaged during COVID-19 Pandemic." 2020. <https://www.unicef.org/india/stories/chakmak-keeps-children-learning-and-engaged-during-covid-19-pandemic>.
- UNICEF. 2020. "COVID-19: A Handbook for Journalists." <https://www.unicef.org/india/reports/covid-19-handbook-journalists>.
- UNICEF. 2020. "Education." 2020. <https://www.unicef.org/india/what-we-do/education>.
- UNICEF. 2020. "Konvensi Hak Anak: Versi anak anak." 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- UNICEF. 2020. "Psychosocial Support for Children during Covid-19." <https://www.unicef.org/india/media/3401/file/PSS-COVID19-Manual-ChildLine.pdf>.
- UNICEF. 2020. "What We Do." 2020. <https://www.unicef.org/india/what-we-do>.
- UNICEF. 2020. "What We Do." 2020. <https://www.unicef.org/what-we-do>.

- UNICEF. 2020. “Why UNICEF India Relies on Voluntary Contributions.” 2020.
<https://www.unicef.org/india/fundraising/why-unicef-india-relies-voluntary-contributions>.
- UNICEF. 2021. “India Case Study: Situation Analysis on the Effects of and Responses to Covid-19 on the Education Sector in Asia.”
<https://www.unicef.org/rosa/media/16511/file/India%20Case%20Study.pdf>.
- UNICEF. 2022. “All Students Back to Learn (India).”
- UNICEF. 2022. “CCC | GLOBAL STANDARDS AND PRINCIPLES.”
Humanitarian UNICEF. 2022.
<https://www.corecommitments.unicef.org/cc-1-3>.
- UNICEF. 2022. “COVID-19 and Children.” UNICEF DATA. 2022.
<https://data.unicef.org/covid-19-and-children/>.
- UNICEF. 2022. “UNICEF India ICO Mid-Year Humanitarian Update.”
<https://www.unicef.org/media/124891/file/India-Humanitarian-SitRep-June-2022.pdf>.
- WHO. 2022. “India: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data.” 2022. <https://covid19.who.int/region/searo/country/in>.